

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

NOMOR HK.02.02.5B.12.25.61TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KENDARI,



ANDI AMIRAH NILAWATI



BPOM
di
Kendari



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

BALAI POM DI KENDARI



TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS 2025-2029
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KENDARI

Pembina

Kepala Balai POM di Kendari

Penanggung Jawab

Nurhadia, S.Si

Ketua

Suharni, S.Si., Apt

Sekretaris

Apriyani Cahyaning, S.Ak

Anggota

Dra. Fausiah Idrus, Apt.

Dra. Hasnah Nur, Apt. MPH

Dra. Mirnawati Purba, Apt.

Wahyuddin Muis, S.Si, Apt., M.Sc.

Abdul Hamid, S.Si, Apt.

Sienny, S.Si, Apt.

Jalidun, S.Si, Apt., MPPM

Asmin Alwi, S.Si., Apt.

Ratna Palupi Fajarini, S.Farm., Apt

Dewi Amni Idrus, S.S.i, Apt

Enny Undari Umbasniajati, SH

Eka Akhriana, S.Farm, Apt

Rizky Afdaliah, S.Farm, Apt.

Sitti Minarni, SE

Yens Roberto Stefanus Welley, S.T

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu agenda program pembangunan nasional bidang kesehatan. Penguatan sistem pengawasan pangan, dan sediaan farmasi menjadi salah satu upaya untuk menguatkan kapasitas ketahanan kesehatan yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terakhir diperbarui melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi



dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 bahwa fokus dari pembangunan transformasi sosial bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses Kesehatan untuk semua melalui upaya kesehatan yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, serta pemerataan kapasitas sistem kesehatan berkualitas di seluruh wilayah. Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2025-2029 adalah kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari. *Output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025-2029 tersebut merupakan bentuk nyata kontribusi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari terhadap pencapaian agenda Pembangunan Nasional, khususnya Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan. Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi.

Kendari, 5 Desember 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari



Andi Amirah Nilawati, S.Si, Apt, M.HSM

Daftar Isi

TIM PENYUSUN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	34
BAB II	66
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	66
2.1 VISI	66
2.2 MISI	67
2.3 TUJUAN BALAI POM DI KENDARI	71
2.4 SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI KENDARI	73
BAB III	86
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	86
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM	86
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI KENDARI	91
BAB IV	110
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	110
4.1 TARGET KINERJA	110
4.2 KERANGKA PENDANAAN	112
BAB V	113
PENUTUP	113
LAMPIRAN	114

Daftar Gambar

<i>Gambar 1 Wilayah Kerja Balai POM di Kendari</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 2 Struktur Organisasi Balai POM di Kendari</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 3 Kriteria Nilai Indikator Kinerja Tahun 2020-2024</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 4 Hasil Kinerja Organisasi BPOM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 5 Capaian Indikator Kinerja BPOM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 6 Tren Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat BPOM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>16</i>
<i>Gambar 7 Tren Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan BPOM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 8 Tren Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 9 Tren Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 10 Tren Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 11 Tren Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 12 Tren Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 13 Tren Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kendari yang optimal Tahun 2020-2024</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 14 Tren Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal Tahun 2020-2024</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 15 Tren Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 16 Tren Terkelolanya keuangan Balai POM di Kendari secara akuntabel Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>30</i>
<i>Gambar 17 Sebaran Pegawai BPOM di Kendari Tahun 2024</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 18 Tingkat Pendidikan Pegawai BPOM di Kendari</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 19 Rumpun Pendidikan Pegawai BPOM di Kendari</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 20 Jabatan Fungsional Pegawai BPOM di Kendari</i>	<i>39</i>
<i>Gambar 21 Pemenuhan Peralatan dan Ruang Lingkup Pengujian BPOM di Kendari (Sumber: Data SKL 2020-2024)</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 22 Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi BPOM di Kendari</i>	<i>45</i>
<i>Gambar 23 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Obat dan Makanan BPOM di Kendari</i>	<i>45</i>
<i>Gambar 24 Jumlah Perkara BPOM di Kendari</i>	<i>46</i>
<i>Gambar 25 Indeks Pelayanan Publik BPOM di Kendari</i>	<i>47</i>
<i>Gambar 26 GAP Kompetensi BPOM di Kendari</i>	<i>48</i>
<i>Gambar 27 Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM di Kendari</i>	<i>54</i>
<i>Gambar 28 Mitra Kerjasama BPOM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	<i>56</i>
<i>Gambar 29 Awareness Index BPOM di Kendari</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 30 Hasil Pengawasan Siber BPOM di Kendari terhadap Produk Ilegal dan telah ditakedown</i>	<i>59</i>
<i>Gambar 31 Sebaran Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Gender</i>	<i>62</i>
<i>Gambar 32 Hasil Pengujian Sampel KLB BPOM di Kendari 2020-2024</i>	<i>63</i>
<i>Gambar 33 Ringkasan Analisis SWOT Balai POM di Kendari</i>	<i>65</i>
<i>Gambar 34 Visi BPOM di Kendari 2025-2029</i>	<i>66</i>

Gambar 35 Misi Presiden (Asta Cita)	68
Gambar 36 Misi Balai POM di Kendari 2025-2029	69
Gambar 37 Kerangka Logis Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai POM di Kendari 2025-2029	82
Gambar 38 <i>Strategi BPOM di Kendari 2025-2029</i>	94

Daftar Tabel

Tabel 1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024.....	11
Tabel 2 Capaian <i>Indeks kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BPOM di Kendari Tahun 2020-2024</i>	18
Tabel 3 ABK BPOM di Kendari Tahun 2024.....	49
Tabel 4 <i>Indikator Tujuan BPOM 2025-2029</i>	72
Tabel 5 <i>Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta</i>	78
Tabel 6 <i>Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BPOM di Kendari 2025-2029</i>	83
Tabel 7 <i>Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029</i>	89
Tabel 8 <i>Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Kendari Tahun 2025-2029</i>	100
Tabel 9 Target Kinerja BPOM di Kendari Periode 2025-2029	110
Tabel 10 <i>Kerangka Pendanaan BPOM di Kendari 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan</i>	112
Tabel 11 <i>Kerangka Pendanaan BPOM di Kendari 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana</i>	112

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 KONDISI UMUM
- 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 berfokus pada Penguatan Fondasi Transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong. Badan POM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

Tugas, fungsi dan kewenangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Balai POM di Kendari melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Obat dan Makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Balai POM di Kendari berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Wilayahnya tersebar pada daratan utama dan ratusan pulau, di antaranya Buton, Muna, Kabaena, Wawonii, dan gugusan Wakatobi—yang membentuk bentang kepulauan khas dengan garis pantai panjang, teluk, serta perairan yang kaya sumber daya. Posisi geografis ini menempatkan Sultra pada simpul penting jalur pelayaran domestik Kawasan Timur Indonesia, sekaligus membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Penduduk Sulawesi Tenggara berdasarkan data BPS pada Tahun 2023 berjumlah $\pm 2,75$ juta jiwa. Secara sosial-demografis, struktur penduduk Sultra relatif muda dengan persebaran yang tidak merata: konsentrasi tertinggi berada di kawasan perkotaan seperti Kendari dan Baubau, sementara kepadatan rendah dijumpai di wilayah kepulauan dan pedalaman. Keberagaman etnik, antara lain Tolaki, Muna, Buton, Moronene, dan komunitas pendatang; membentuk mosaik budaya yang dinamis. Bahasa daerah, tradisi maritim, serta kearifan lokal dalam pengelolaan lahan dan laut masih kuat mewarnai kehidupan sehari-hari, meski urbanisasi dan mobilitas kerja terus meningkat.

Ekonomi Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV Tahun 2024 tumbuh pada 5,08%. Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu: pertambangan (khususnya nikel), industri pengolahan, dan pertanian-perikanan. Dalam satu dekade terakhir, hilirisasi mineral mendorong tumbuhnya kawasan industri berbasis logam dan memicu perkembangan jasa penunjang seperti logistik, konstruksi, serta perdagangan.

Jaringan infrastruktur Sulawesi Tenggara terus berkembang. Akses udara melalui Bandara Haluoleo di Kendari menghubungkan provinsi ini dengan kota-kota besar di Indonesia, sedangkan bandara di Baubau dan Wakatobi memperkuat konektivitas antar-pulau. Pelabuhan laut menjadi urat nadi distribusi barang, baik untuk komoditas pertambangan maupun kebutuhan pokok. Peningkatan kualitas dan keterhubungan jalan provinsi dan kabupaten terus diupayakan, namun tantangan geografis pada wilayah kepulauan menjadikan layanan transportasi penyeberangan dan pelayaran rakyat tetap krusial. Digitalisasi juga merata lebih cepat di pusat pertumbuhan, sementara daerah terpencil masih mengejar kualitas layanan telekomunikasi. Letak Sulawesi Tenggara yang berada pada simpul perdagangan darat–laut–udara membuat arus barang relatif mudah masuk. Di celah itulah sebagian pelaku memasarkan produk tanpa izin edar mulai dari kosmetik/obat tradisional, obat hingga narkoba. Kosmetik ilegal menjadi komoditi yang paling sering diperdagangkan.

Karakteristik Sulawesi Tenggara memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri atas banyak kabupaten/kota yang tersebar di daratan dan kepulauan. Letak geografis yang tersebar membuat peredaran obat, makanan, kosmetik, dan suplemen berlangsung secara luas dan beragam—baik melalui pasar

tradisional, toko modern, maupun penjualan daring (*online*). Kondisi ini menimbulkan tantangan pengawasan, antara lain: 1] Sulitnya jangkauan ke daerah kepulauan; 2] Perbedaan tingkat kesadaran masyarakat antar wilayah; 3] Banyaknya produk dari luar provinsi yang masuk tanpa pengawasan; dan 4] Meningkatnya perdagangan *online* lintas daerah; dan 5] Meningkatnya pelaku usaha pangan olahan skala UMKM.

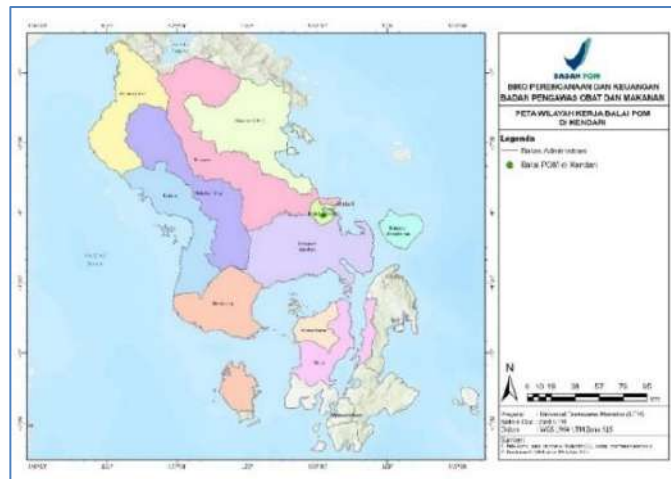
Selain itu, Sulawesi Tenggara memiliki ribuan pelaku usaha UMKM mencakup pangan olahan lokal (seperti abon ikan, keripik singkong, sambal khas daerah, olahan rumput laut, kue tradisional); kosmetik dan jamu tradisional berbasis bahan alam lokal, minuman herbal dan suplemen alami. Kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi BPOM di Kendari. Banyak UMKM menghadapi kendala terkait pemahaman persyaratan izin edar; menjadi peluang dalam pemberian bimbingan dan edukasi bagi petugas BPOM di Kendari. Keterbatasan dalam pemenuhan standar produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), minimnya pengetahuan tentang keamanan pangan, teknologi dan bahan tambahan pangan, serta belum optimalnya kemasan dan label produk sesuai regulasi, menuntut pentingnya tugas dan fungsi BPOM di Kendari baik sebagai fasilitator maupun sebagai pengawas. Selain itu, BPOM di Kendari juga menjadi mitra Pembangunan ekonomi daerah.

BPOM di Kendari yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan dan pendidikan yang berkembang dengan pesat termasuk peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan; menuntut pengawasan yang lebih ketat; agar produk yang beredar aman dan bermutu. Sebagai UPT yang merupakan perpanjangan tangan BPOM di daerah, kedudukannya bersifat vertikal yang langsung dibawah koordinasi pusat, dan bersifat horizontal dengan pemerintah daerah, dengan fungsi utamanya mencakup pelaksanaan pengawasan *premarket* dan *postmarket* sesuai wilayah pengawasan BPOM di Kendari.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 357 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi UPT pada BPOM; Balai POM di Kendari sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPOM di Kendari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

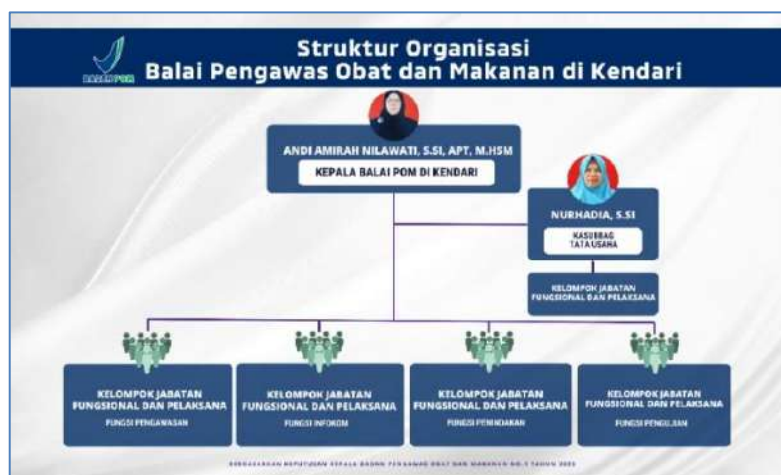
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas utama Balai POM di Kendari sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. Balai POM di Kendari beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari. Wilayah kerja Balai POM di Kendari terdiri dari 11 Kota/Kabupaten yaitu: 1] Kota Kendari; 2] Kabupaten Muna; 3] Kabupaten Kolaka; 4] Kabupaten Konawe; 5] kabupaten Konawe Selatan; 6] Kabupaten Bombana; 7] Kabupaten Kolaka Utara; 8] Kabupaten Kolaka Timur; 9] Kabupaten Muna Barat; 10] Kabupaten Konawe Utara; dan 11] Kabupaten Konawe Kepulauan.



Gambar 1 Wilayah Kerja Balai POM di Kendari

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur organisasi BPOM di Kendari adalah sebagai berikut.



Gambar 2 Struktur Organisasi Balai POM di Kendari

1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional melaksanakan tugas dalam tim kerja yang melaksanakan kebijakan operasional di bidang (fungsi) nya untuk mendukung tujuan dan kinerja organisasi.

a. Fungsi Pengujian

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi sediaan farmasi dan pangan olahan. Adapun tugas nya adalah;

1. Penyusunan rencana dan program dan anggaran di substansi pengujian kimia dan mikrobiologi sediaan farmasi dan pangan olahan;
2. Pelaksanaan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin dan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi sediaan farmasi dan pangan olahan.

b. Fungsi Pemeriksaan

Fungsi Pemeriksaan yang terdiri dari bagian Pemeriksaan dan bagian Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi, sarana distribusi Obat dan Makanan, sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) sediaan farmasi dan pangan olahan. Tugas Fungsi Pemeriksaan adalah;

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi, sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan, sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) sediaan farmasi dan pangan olahan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi sediaan farmasi dan pangan olahan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (Sampling) sediaan farmasi dan

pangan olahan;

6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

c. Fungsi Informasi dan Komunikasi

Kelompok Fungsi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan;

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

d. Fungsi Penindakan

Fungsi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Fungsi Penindakan melaksanakan;

- a. Penyusunan rencana program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- b. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran, ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan.

Balai POM di Kendari perlu melakukan peningkatan klasifikasi organisasi menjadi Balai Besar sesuai perkembangan lingkungan strategis pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung percepatan pencapaian program pemerintah, serta menjadi bagian kebutuhan penataan organisasi BPOM. Peningkatan klasifikasi organisasi menjadi Balai Besar POM di Kendari diharapkan terealisasi pada Tahun 2026. Hal ini sejalan dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 105 Tahun 2025 tentang *Road Map* Penataan Organisasi UPT BPOM Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Balai POM di Kendari dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (*top-down*) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara *Tematik, Holistik, Integratif* dan *Spasial* (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang utuh, maka Renstra Balai POM di Kendari disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian Visi dan Misi BPOM periode 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kendari periode 2025-2029 dirancang untuk menanggapi tantangan saat ini sekaligus untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini memungkinkan BPOM di Kendari untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas dan bermutu.

Renstra Balai POM di Kendari 2025-2029 merupakan bentuk upaya BPOM di Kendari dalam melindungi kesehatan dan keselamatan publik Sulawesi Tenggara. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Kendari bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu.

1.1.1 Capaian Kinerja Balai POM di Kendari periode Renstra 2020-2024

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai

untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Balai POM di Kendari. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:



Gambar 3 Kriteria Nilai Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Pelaksanaan sasaran kegiatan Balai POM di Kendari pada periode 2020-2024 menghadapi beberapa peristiwa global seperti mewabahnya penyebaran virus *Covid-19* dan kebijakan *lockdown* di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut menyebabkan *stagnan* hingga penurunan perekonomian dan perubahan sistem kegiatan pertemuan. Selain itu pemberian obat-obatan dan antivirus *Covid-19* berdampak besar dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BPOM adalah mendesaknya penggunaan antivirus *Covid-19* terhadap masyarakat dalam rangka penanganan wabah sekaligus penguatan pengawasan obat antivirus sesuai standar agar aman, bermutu dan berkhasiat dikonsumsi masyarakat.

Capaian sasaran kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat periode 2020-2024 mengalami fluktuasi; dimana terjadi penurunan pada tahun 2021 kemudian mengalami kenaikan secara teratur pada tahun 2022-2024. Penurunan pada tahun 2021 disebabkan oleh belum

tercapainya indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Hal ini karena banyak sampel pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mutu hasil pengujian fortifikasi terhadap garam kasar lokal. Balai POM di Kendari telah menindaklanjuti hal ini dengan secara aktif mengedukasi pelaku usaha garam lokal di wilayah Sulawesi Tenggara untuk memenuhi parameter fortifikan dengan menambahkan iodium pada garam, sehingga pada tahun 2022 terjadi peningkatan pangan fortifikasi yang MS terutama pada garam kasar lokal.

Pada capaian sasaran kegiatan peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode 2020-2024 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga pada sasaran kegiatan Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang mengalami peningkatan selama lima tahun periode renstra. Hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Kendari untuk terus berupaya melakukan penguatan sistem laboratorium sesuai standar dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 disajikan pada table berikut.

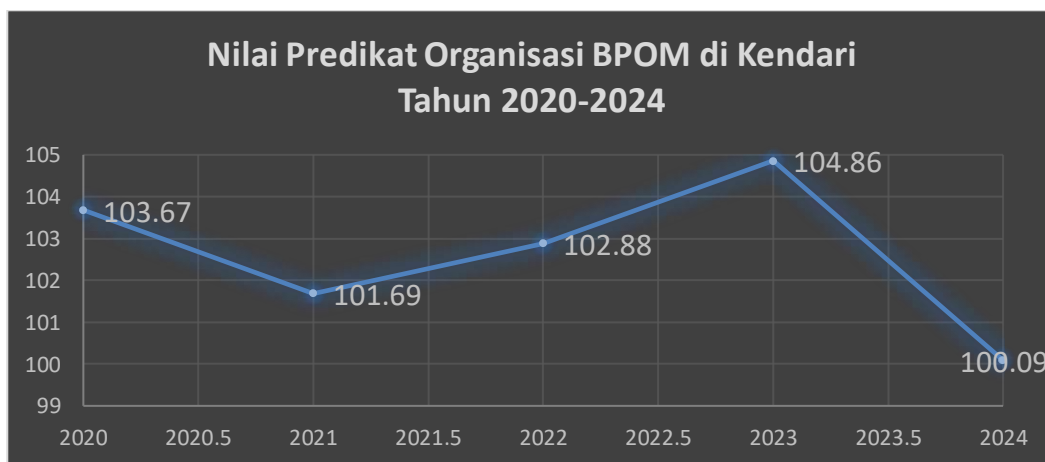
Tabel 1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	SK 1											
IKK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	96,94	96,50	98,54	97,00	99,02	97,50	99,08	99,10	97,05
IKK2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	86,31	87,50	92,18	89,00	94,04	90,50	92,31	93,20	87,27
IKK3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	96,33	96,00	99,26	96,50	99,29	97,00	98,52	98,90	96,53
IKK4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	87,72	82,00	92,59	84,00	92,52	86,00	91,27	90,00	90,48
IKK5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat			95,00	49,04	96,00	98,08	97,50	72,86	80,00	82,50
	SK 2											
IKK6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	68,00	72,60	75,00	74,77	78,00	79,90	81,00	81,73	84,00	83,73
	SK 3											
IKK7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,00	86,31	80,30	85,50	81,30	93,10	82,40	96,30	96,40	96,92
IKK8		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69,00	66,16	68,36	67,20	70,57	75,25	72,79	80,62	80,70	80,83
IKK9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,50	68,66	90,00	90,25	91,00	94,49	92,00	94,52	95,75	97,27
	SK 4											
IKK10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50,00	57,53	59,00	55,47	64,00	95,62	70,00	98,31	98,40	99,74
IKK11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54,80	54,80	50,00	54,05	55,00	80,11	60,00	69,85	80,00	88,83
IKK12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	90,00	86,00	97,46	88,00	99,73	90,00	100,00	99,80	100,00
IKK13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	48,51	55,00	68,33	60,00	67,16	65,00	68,75	70,00	71,88

Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKK14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	54,60	60,00	80,33	63,00	64,68	66,00	68,65	68,70	71,70
IKK15		Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,04	4,01	4,01	4,17	4,69	4,40	4,52	4,60	4,76
IKK16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik					77,00	85,88	79,00	83,33	100,00	100,00
IKK17		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota									95,00	82,00
	SK 5											
IKK18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,49	94,41	93,50	95,03	94,90	92,85	96,30	98,65	99,50	99,60
IKK19		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	14	14	40	42	62	62	82	82	106	108
IKK20		Jumlah desa pangan aman	4	4	12	12	19	19	25	25	32	32
IKK21		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	6	6	9	9	12	12	15	15
	SK 6											
IKK22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKK23		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86,00	98,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	SK 7											
IKK24	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86,00	97,37	97,00	111,00	98,00	100,00	99,00	100,00	100,00	77,50
	SK 8											
IKK25	Terwujudnya tatakelolapemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85,00	73,32	78,50	78,72	81,00	89,84	83,50	89,32	91,82	86,33
IKK26		Nilai AKIP UPT	80,00	76,23	78,20	79,36	80,20	78,25	82,20	79,80	82,26	80,27
IKK27		Nilai Pengelolaan Kearsipan										95,26

Kode	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	SK 9											
IKK28	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	82,80	83,00	84,61	83,50	84,60	84,00	89,20	90,74	86,46
	SK 10											
IKK29	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72,00	68,60	73,00	73,90	78,00	80,40	83,00	84,70	86,00	86,49
IKK30		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	1,45	2,00	1,87	2,25	2,30	2,50	2,90	3,00	3,00
	SK 11											
IKK31	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,40	97,31	98,30	89,15	98,50	89,92	98,80	90,68	94,00	91,16
IKK32		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Kendari	95,00	100,00	95,50	100,00						
IKK33		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa									76,62	100,00
IKK34		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara									61,00	98,09
IKK35		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri									60,00	63,24

Nilai Kinerja Organisasi BPOM di Kendari bergerak fluktuatif selama periode renstra 2020-2024. Namun demikian, Balai POM di Kendari selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya, yang terlihat dari peningkatan nilai kinerja secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 serta perolehan predikat NPS “Istimewa” setiap tahunnya. NPS BPOM di Kendari dapat dilihat sebagai berikut.

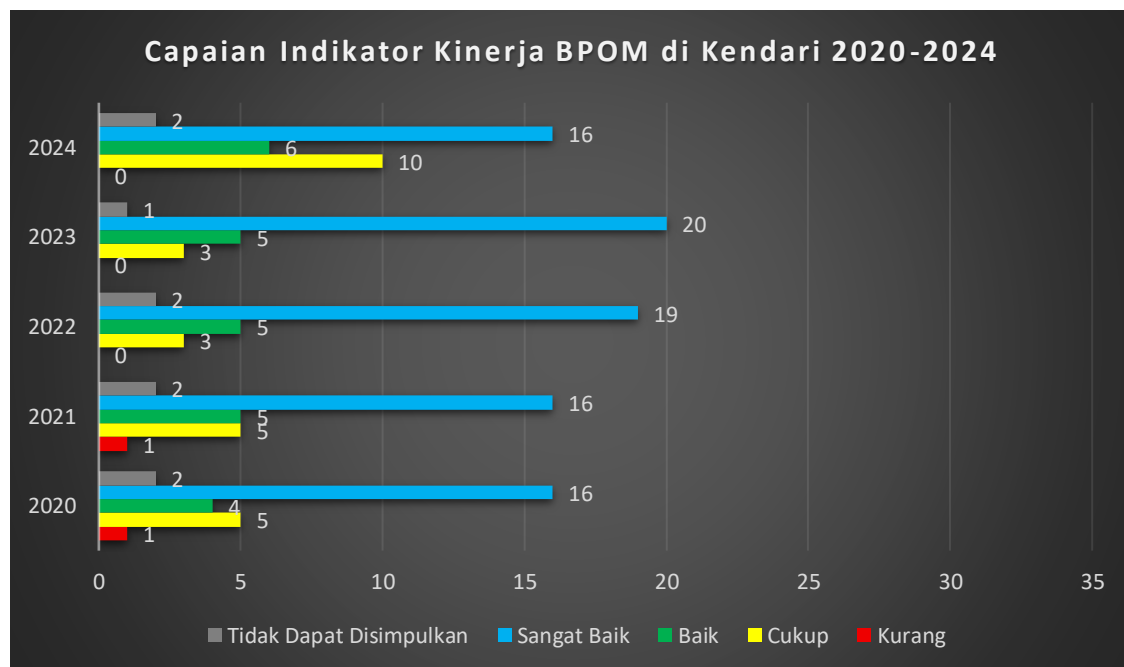


Gambar 4 Hasil Kinerja Organisasi BPOM di Kendari Tahun 2020-2024

Penyusunan sasaran strategis Balai POM di Kendari periode 2020-2024 menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang membagi 11 sasaran strategis kedalam tiga perspektif, yaitu perspektif *stakeholder*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Perspektif *stakeholder* BPOM di Kendari berfokus pada pemenuhan harapan Masyarakat Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari tiga sasaran strategis yaitu (1) pemenuhan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat; (2) peningkatan kesadaran masyarakat terhadap mutu Obat dan Makanan; dan (3) peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Perspektif *Internal process* BPOM di Kendari berfokus pada: (1) peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana; (2) peningkatan efektivitas KIE; (3) peningkatan efektivitas pemeriksaan produk; dan (4) peningkatan efektivitas penindakan. Perspektif *Learning and Growth* menunjukkan kemampuan BPOM di Kendari dalam meningkatkan kapabilitasnya yang terdiri atas aspek (1) tata kelola pemerintahan; (2) kinerja SDM; (3) penguatan laboratorium dan data informasi; dan (4) pengelolaan keuangan pada BPOM di Kendari.

Evaluasi ketercapaian tujuan renstra merupakan upaya BPOM di Kendari untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

Capaian kinerja selama lima tahun periode Renstra 2020-2024 Balai POM di Kendari dapat digambarkan sebagai berikut.

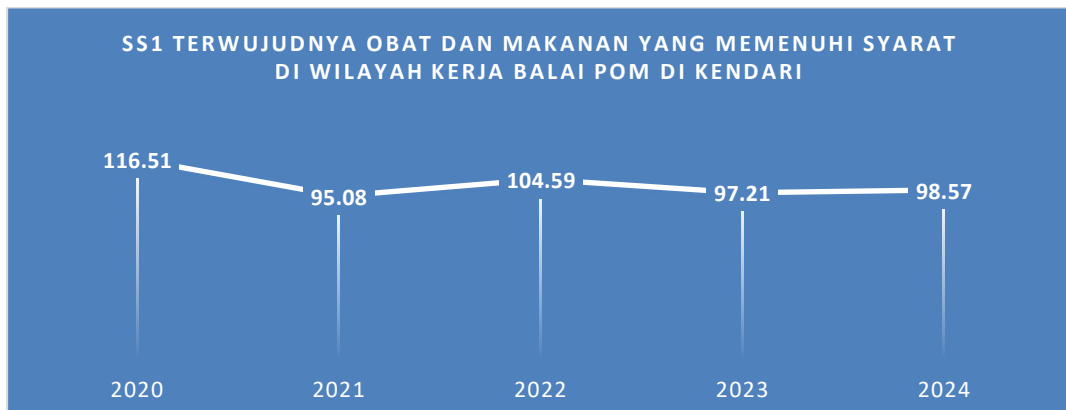


Gambar 5 Capaian Indikator Kinerja BPOM di Kendari Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pada akhir periode renstra terdapat kenaikan jumlah indikator kinerja menjadi 34 indikator. Kenaikan indikator ini dikarenakan terdapat indikator yang pada tahun sebelumnya menjadi *direct indikator* dijadikan indikator kinerja utama pada tahun 2024. Pada grafik juga menunjukkan bahwa terjadi sejak Tahun 2022-2024 tidak ada indikator dengan kategori kurang. Pada akhir tahun periode renstra, (2024) menunjukkan penurunan indikator kinerja dengan kriteria baik disbanding Tahun 2023. Namun, hasil evaluasi juga menunjukkan pada akhir periode renstra (2024) terdapat kenaikan indikator dengan kriteria cukup dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penjelasan terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari



Gambar 6 Tren Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat BPOM di Kendari Tahun 2020-2024

BPOM di Kendari telah melakukan pengawasan terhadap komoditas Obat dan Makanan dengan tidak menyediakan ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi juga dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

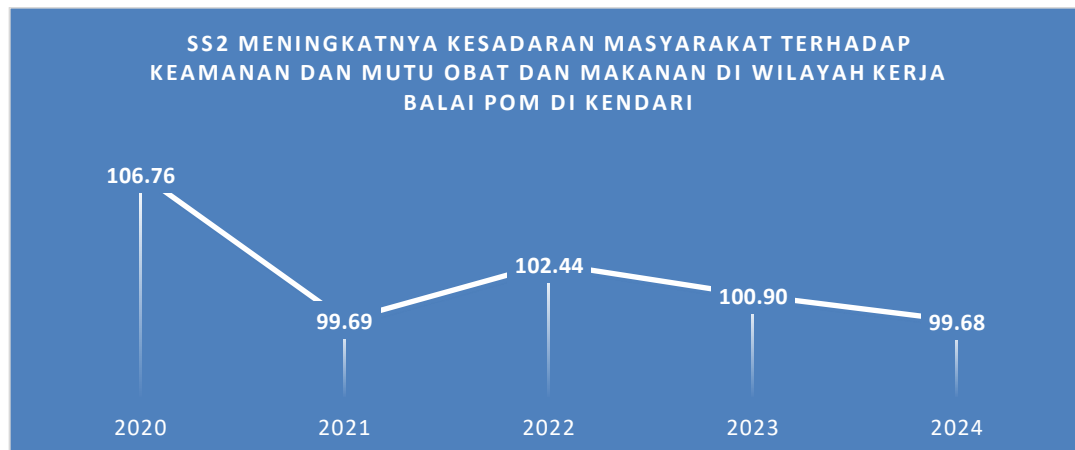
Sasaran kegiatan ini diukur berdasarkan lima indikator kinerja yaitu: 1] Persentase Obat yang memenuhi syarat; 2] Persentase Makanan yang memenuhi syarat; 3] Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 4] Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 5] Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari memiliki tren fluktuatif selama tahun 2020-2024. Pada Tahun 2023-2024 terjadi tren penurunan capaian sasaran Dimana nilai NPS pada kedua tahun tersebut <100%. Tidak optimalnya pencapaian NPS tersebut akibat adanya peningkatan sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Obat dan Makanan, yang sebagian besar sampel tersebut diproduksi

di luar wilayah kerja BPOM di Kendari sehingga tidak dapat dilakukan intervensi lebih lanjut kepada produsen. TMS sampel tersebut selain dari TMS Pengujian juga merupakan TMS Penandaan. Selain itu adanya peningkatan target kinerja yang cukup signifikan juga mempengaruhi pencapaian nilai sasaran.

Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan capaian di masa mendatang, penting untuk melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab dan meningkatkan upaya mitigasi risiko dalam pencapaian indikator. Terhadap sarana yang berada di wilayah kerja BPOM Kendari akan meningkatkan frekuensi pembinaan secara berkala terhadap pemilik sarana distribusi produk Obat dan Makanan. Selain itu akan dilakukan peningkatan kualitas bimbingan dan edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat terkait distribusi dan penggunaan Obat dan Makanan yang bermutu.

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari



Gambar 7 Tren Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan BPOM di Kendari Tahun 2020-2024

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari memiliki tren fluktuatif selama tahun 2020-2024. Sasaran ini mencerminkan efektivitas program komunikasi informasi edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh BPOM di Kendari, serta keterlibatan lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan didukung oleh satu indikator yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Pengukuran ndeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman BPOM di Kendari dari Tahun 2020–2024 terjadi kenaikan. Namun, kenaikan realisasi tersebut tidak sebanding dengan kenaikan target, sehingga capaian digambarkan menurun.

Tabel 2 Capaian *Indeks kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BPOM di Kendari Tahun 2020-2024*

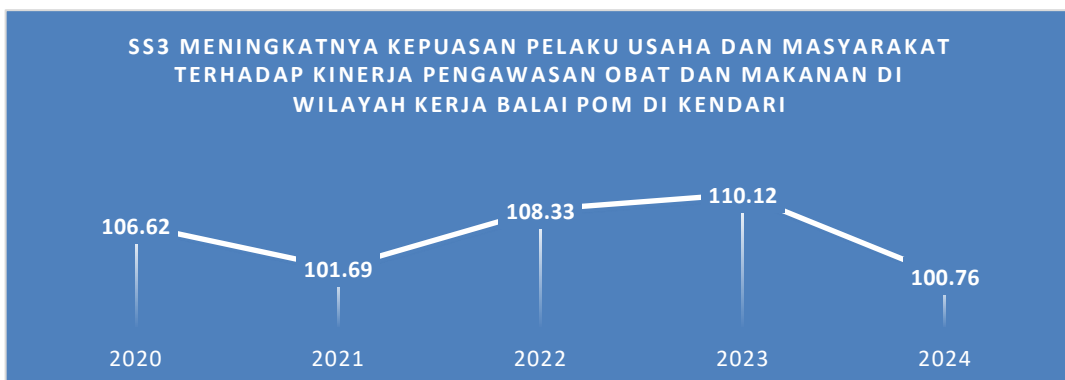
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	68	75	78	81	84
Realisasi	72.6	74.77	79.9	81.73	83.73
Capaian	106.76	99.69	102.44	100.90	99.68

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tahun mendatang, beberapa kegiatan yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan antar lain sebagai berikut.

- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan;
- Penguatan peran UPT BPOM di daerah dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan;
- Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer;
- Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK

- seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll;
- e) Menjalinkan kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen seperti dengan pemasangan banner, poster, dan pamphlet edukasi;
 - f) Pemanfaatan layanan informasi secara intens melalui media social (Website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, dll);
 - g) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hanya mengkonsumsi produk yang aman dan terjaga mutunya. Sehingga produsen akan lebih meningkatkan keamanan dan kualitas produknya.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari



Gambar 8 Tren Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Kendari Tahun 2020-2024

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari memiliki tren peningkatan selama tahun 2020-2024. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan

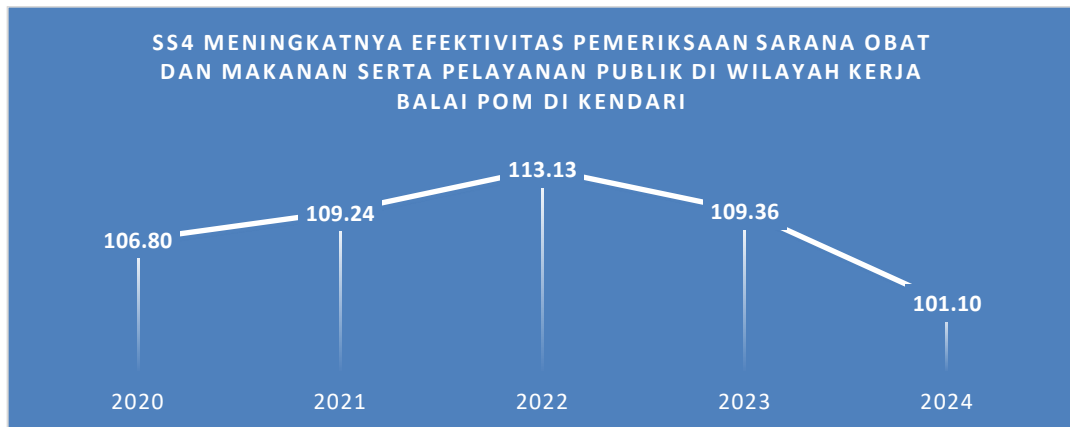
pengawasan yang dijalankan oleh BPOM dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelaku usaha.

Sasaran kegiatan Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan didukung oleh tiga indikator yaitu: 1] Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; 2] Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan; dan 3] Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

Pada Tahun 2024 ketiga indikator pada sasaran Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan menunjukkan realisasi melebihi target dengan kriteria Sangat Baik. Namun, kenaikan realisasi tersebut tidak signifikan dengan kenaikan target, sehingga capaian menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Beberapa upaya dalam penyempurnaan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di tahun mendatang diantaranya:

- a) Peningkatan kompetensi dan soft-skill petugas dalam pemberian bimbingan pada pelaku usaha;
- b) Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pendampingan kepada pelaku usaha;
- c) Peningkatan kegiatan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti razia obat dan makanan TIE, pangan kedaluwarsa dengan dengan pesan bahwa BPOM hadir melindungi Masyarakat;
- d) Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk berbahaya dan ilegal;
- e) Peningkatan penguatan teknologi informasi dalam sosialisasi hasil pengawasan kepada Masyarakat;
- f) Review terhadap standar pelayanan dan penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan serta penyesuaian kebutuhan Masyarakat;
- g) Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dalam ruang layanan public; dan
- h) Perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja pelayanan publik

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kendari



Gambar 9 Tren Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Pemeriksaan yang dilakukan BPOM di Kendari antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor, sehingga Obat dan Makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kendari memiliki tren peningkatan selama tahun 2020-2022, kemudian mengalami penurunan pada 2023-2024 namun masih dalam kriteria NPS Sangat Baik dengan capaian >100%. Peningkatan target indikator kinerja yang cukup signifikan merupakan salah satu faktor penyebab turunnya NPS di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan delapan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Indeks Pelayanan Publik; (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik; dan (8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2024 indikator yang tidak memenuhi target dalam mendukung sasaran keempat adalah Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengukuran terhadap kinerja indikator ini hanya dilakukan pada Tahun 2024m sehingga nilai trend tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyebab belum tercapainya target indikator tersebut dikarenakan ada tiga Kabupaten yang belum menandatangani SK TKPPOM dan SK TPPS yang melibatkan Balai POM di Kendari dalam SK tersebut, hal ini juga disebabkan pejabat definitif di kabupaten tersebut belum ditetapkan. Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian keberhasilan tersebut di masa mendatang salah satunya dengan melakukan koordinasi yang baik antara UPT Balai POM di Kendari dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di wilayah kerja Balai POM di Kendari terkait keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan. Melalui koordinasi tersebut diharapkan ada penyelarasan rencana aksi pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dengan dokumen perencanaan daerah.

5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari

Komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang

berbahaya. Sasaran kegiatan ini diukur berdasarkan empat indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan; (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman; (3) Jumlah desa pangan aman; (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.



Gambar 10 Tren Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024

Trend menunjukkan terjadi peningkatan capaian kinerja indikator yang sejalan dengan peningkatan targetnya. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi BPOM di Kendari dalam meningkatkan efektivitas KIE juga mencerminkan semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa BPOM di Kendari tidak hanya berhasil dalam mendistribusikan informasi, tetapi juga mampu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan Obat dan Makanan.

6. Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran Kegiatan ini

diukur berdasarkan dua indikator yaitu (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; dan (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Gambar 11 Tren Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan yang positif dengan capaian kinerja paling optimal sebesar 120% pada akhir periode renstra. Kenaikan kinerja Persentase Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar menunjukkan komitmen BPOM di Kendari dalam memastikan bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari menunjukkan tren peningkatan yang positif.

7. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak

pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka BPOM di Kendari harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan makanan di Sulawesi Tenggara. BPOM di Kendari dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di Sulawesi Tenggara.



Gambar 12 Tren Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024

Sasaran pada kegiatan ini didukung oleh satu indikator yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Capaian efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari menunjukkan tren capaian kinerja yang positif selama Tahun 2020-2023, kemudian menurun pada Tahun 2024. Fluktuasi capaian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja. Salah satu faktor utama adalah kompleksitas perkara, yang mempengaruhi lama proses penyelidikan hingga persidangan.

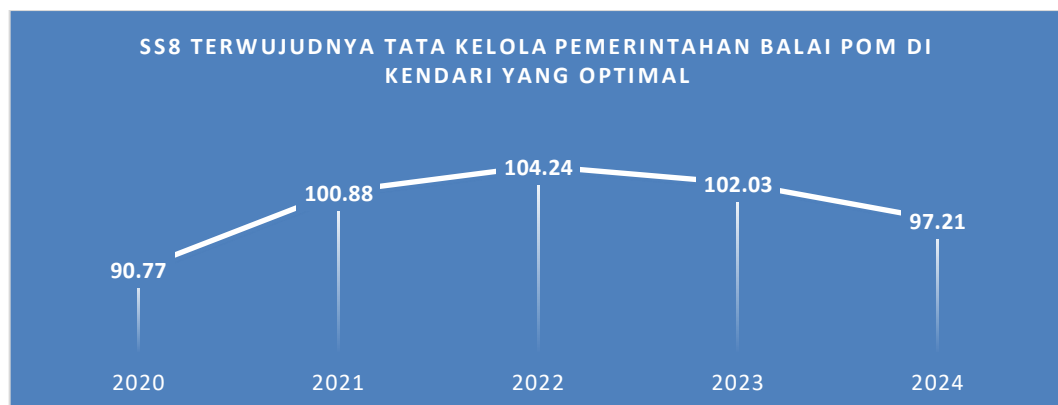
Upaya perbaikan capaian pada periode mendatang yang dapat dilakukan BPOM di Kendari diantaranya:

- Peningkatan koordinasi dengan jaksa penuntut umum terhadap penyelesaian perkara;
- Koordinasi aktif dengan Criminal Justice System (CJS) terkait dengan penyelesaian perkara sehingga mempercepat proses penyelesaian berkas perkara;

- c) Melakukan pendalaman informasi terkait informasi intelijen yang didapatkan melalui patroli siber, informasi/pengaduan Masyarakat maupun informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM RI dan ditindaklanjuti dengan proses pro justitia.
- d) Koordinasi aktif dengan meminta bantuan direktur Cyber BPOM untuk melakukan akuisisi alat komunikasi berupa HP dalam penerapan pasal pidana.
- e) Pendalaman dan analisis informasi yang akurat dalam rangka penetapan target operasi penindakan.

8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kendari yang optimal

Tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang menjadi tujuan reformasi birokrasi diwujudkan dengan pelaksanaan tugas BPOM secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan partisipatif (keterlibatan masyarakat). Untuk itu diperlukan penataan organisasi yang menekankan pada penguatan kelembagaan dan tata hubungan kerja (proses bisnis), baik hubungan dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan serta hubungan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Penataan organisasi bertujuan untuk membangun organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di kendari. Pelaksanaan tugas yang disertai dengan sistem pengendalian intern yang optimal akan memastikan pencapaian tujuan BPOM di Kendari sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 13 Tren Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kendari yang optimal Tahun 2020-2024

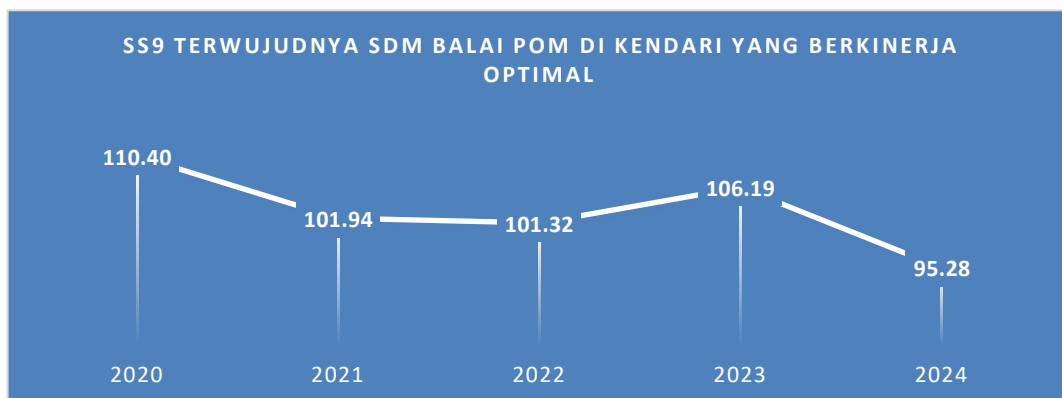
Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan tiga indikator yaitu 1] Indeks RB BPOM di Kendari; 2] Nilai AKIP BPOM di Kendari; dan 3] Nilai Pengelolaan Kearsipan. Terdapat tren positif capaian sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kendari pada Tahun 2020-2022; namun tren mengalami penurunan pada Tahun 2023-2024. Penurunan sasaran ini dikarenakan belum tercapainya indikator AKIP dan indikator RB BPOM di Kendari sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian indeks RB BPOM di Kendari pada akhir periode renstra 2024 belum memenuhi target. Balai POM di Kendari berkomitmen untuk meningkatkan Indeks RB dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh komponen area perubahan dengan pelibatan aktif seluruh pegawai BPOM di Kendari. Selain itu, BPOM di Kendari juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat.

Pada indikator AKIP, terdapat peningkatan nilai AKIP BPOM di Kendari pada akhir periode renstra 2024, namun tidak signifikan disbanding dengan peningkatan targetnya, sehingga capaian belum optimal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan BPOM di Kendari dalam meningkatkan nilai AKIP pada periode mendatang diantaranya: (1) Peningkatan pemahaman dan kesadaran SDM BPOM di Kendari terkait akuntabilitas kinerja; (2) Komitmen dalam implementasi Reward and Punishment dengan dari level Tim sd Individu; (3) Peningkatan komitmen pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal setiap bulan; (4) Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui Bimbingan Teknis/Workshop dan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja; dan (5) Mengupayakan capaian kinerja tahun mendatang agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

9. Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.



Gambar 14 Tren Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal Tahun 2020-2024

Realisasi indeks profesionalisme ASN BPOM di Kendari berfluktuatif sepanjang 2020-2024. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, IP ASN BPOM di Kendari Tahun 2024 mengalami penurunan. Terdapat penurunan nilai indeks profesionalitas ASN BPOM di Kendari pada Tahun 2024 karena terdapat perubahan tools pengukuran berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Nomor 006/B-4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Selain itu masih terdapat pegawai BPOM yang belum mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis juga menjadi penyebab kegagalan kinerja terkait indikator ini.

BPOM di Kendari berkomitmen untuk mengupayakan capaian peningkatan nilai IP ASN di masa mendatang melalui: 1] Mendorong pegawai untuk senantiasa mengikuti pengembangan kompetensi; 2] Mengupayakan agar tidak ada pegawai yang terkena hukuman disiplin; dan 3] Pemberian reward dan punishment secara berimbang untuk memotivasi pegawai untuk disiplin kerja dan meningkatkan kinerjanya.

10. Sasaran Kegiatan 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Data dan informasi mengenai pengawasan

obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan.



Gambar 15 Tren Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024

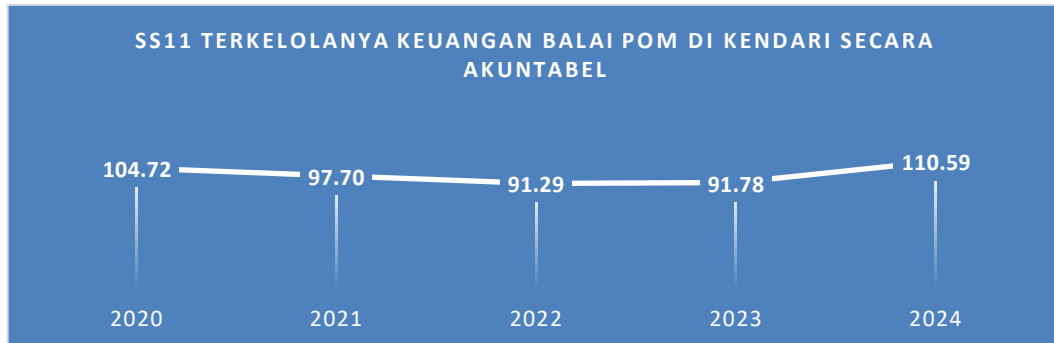
Terdapat peningkatan yang konsisten dalam pemenuhan standar kemampuan pengujian di laboratorium BPOM di Kendari yang menunjukkan bahwa kualitas laboratorium BPOM di Kendari terus membaik dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini merupakan wujud dari upaya intensif dan kolaboratif yang dilakukan BPOM di Kendari, antara lain melalui monitoring dan evaluasi Standar Kemampuan Laboratorium secara triwulanan, sehingga kendala dapat segera diatasi; pemenuhan standar ruang lingkup pengujian melalui uji profesiensi dan pelatihan; penyediaan peralatan laboratorium melalui pengadaan, pemeliharaan, dan kalibrasi; serta peningkatan kompetensi SDM sesuai penugasan pengujian.

11. Sasaran Kegiatan 11: Terkelolanya keuangan Balai POM di Kendari secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM di Kendari dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran kegiatan ini didukung oleh empat indikator kinerja, yaitu: 1]

Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri; 2] Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; 3] Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; dan 4] Nilai Kinerja Anggaran.



Gambar 16 Tren Terkelolanya keuangan Balai POM di Kendari secara akuntabel Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024

Tren sasaran Terkelolanya keuangan Balai POM di Kendari secara akuntabel Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini merupakan wujud komitmen BPOM di Kendari untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, juga sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas organisasi kepada masyarakat.

Namun demikian, pada indikator Nilai Kinerja Anggaran kinerja Tahun 2023-2024 belum memenuhi target. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga menimbulkan GAP yang cukup tinggi dan penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan batas minimal realisasi tiap jenis belanja sesuai ketentuan. Ketidakakuratan realisasi belanja terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun tersebut menyebabkan penurunan kualitas Nilai Kinerja Anggaran (NKA). BPOM di Kendari berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan NKA melalui (1) penyesuaian RPD setelah dilakukan revisi anggaran, sehingga memperkecil deviasi Hal III DIPA dalam pencapaian nilai IKPA yang optimal; dan (2) Konsistensi penyerapan anggaran dengan capaian output secara bulanan sehingga nilai konsistensi dalam optimalisasi nilai EKA tinggi.

1.1.2 Aspirasi dan Ekspektasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. UPT terdiri atas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2025.

Tugas utama Balai POM di Kendari sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kendari perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan tugas yang dinamis dengan berbagai tantangan, sehingga diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perubahan lingkungan strategis baik aspek teknologi maupun dinamika sosial ekonomi. Balai POM di Kendari memahami pentingnya aspirasi masyarakat terutama di Sulawesi Tenggara

dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang responsif terhadap isu-isu kesehatan yang muncul; masalah keamanan dan mutu pangan; peredaran kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya; penyalahgunaan obat-obat tertentu; dan ketersediaan produk kesehatan yang aman, bermutu dan berkualitas bagi Masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Dalam rangka mendapatkan aspirasi masyarakat, BPOM di Kendari memperkuat kualitas layanan publik dan meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Konsultasi Publik. Penjaringan aspirasi tersebut dilaksanakan dengan berbagai mekanisme seperti menerima masukan, keluhan, dan kebutuhan masyarakat melalui kanal media, baik secara *online* (*Whatsapp, Instagram, facebook, email, HALOBPOM*) maupun *offline*. Penjaringan aspirasi ini menjadi komitmen BPOM di Kendari untuk membangun pengawasan yang partisipatif, responsif dan berorientasi terhadap kebutuhan publik. Forum Konsultasi Publik menjadi ruang diskusi terbuka untuk menghimpun pendapat dan ekspektasi masyarakat secara berkala dengan melibatkan konsumen, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, akademisi, dan media. Selain itu secara rutin dilaksanakan survei kepuasan pelanggan untuk mengevaluasi layanan yang diberikan BPOM di Kendari, seperti layanan informasi, konsultasi, pengaduan, pengujian pihak ketiga, dan sertifikasi/izin edar.

Hasil Forum konsultasi dan komunikasi publik serta masukan dalam survei kepuasan pelanggan aspirasi masyarakat menunjukkan harapan/ekspektasi yang tinggi terhadap BPOM di Kendari dalam memperkuat perlindungan konsumen melalui pengawasan obat dan makanan. Masyarakat mengharapkan pengawasan yang dilakukan lebih intensif layanan pengaduan yang responsif, serta edukasi yang mudah diakses dan dipahami. Pelaku usaha berharap adanya pendampingan yang berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Selain itu, publik berharap agar BPOM lebih terbuka dalam penyampaian informasi pengawasan serta menjalin koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas. Harapan ini menjadi dasar bagi Balai POM di Kendari dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja pengawasan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Proses penjaminan pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sehingga harapan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Kendari 2025-2029. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Balai POM di Kendari dalam menyusun perencanaan kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

1.1.3 Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
- 5) Keputusan Kepala Badan POM Nomor 434 Tahun 2023 tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

- Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Penyusunan Renstra Balai POM di Kendari 2025-2029 memahami bahwa potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi dan kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang responsif terhadap dinamika kesehatan. Balai POM di Kendari sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan mutu produk Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengemban perannya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Melalui identifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan untuk digali dan permasalahan yang harus diatasi, Balai POM di Kendari dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan pelayanan publik dan terselenggaranya pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dan bermanfaat bagi Masyarakat.

Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Kendari dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berkualitas. Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif membantu BPOM di Kendari dalam menghadapi potensi dan permasalahan baik saat ini maupun dimasa depan. Analisis SWOT merupakan pendekatan yang dipakai dalam memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Kendari periode 2025-2029. Pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM di Kendari, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Kendari

perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

1.2.1. Kekuatan (*Strength*)

Balai POM di Kendari telah mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki dalam rangka mengevaluasi sumber daya, kapabilitas dan aspek strategis agar dapat melakukan pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara optimal. Analisis kekuatan membantu Balai POM di Kendari dalam memperkuat posisi Balai POM di Kendari dimasa mendatang. Aset internal Balai POM di Kendari yang menjadi keunggulan dan kekuatan adalah:

1) **Komitmen pimpinan dan ASN BPOM di Kendari menerapkan Reformasi Birokrasi**

Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Balai POM di Kendari mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Berfokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan Balai POM di Kendari dapat beradaptasi dengan tantangan saat ini dan proaktif mengantisipasi perubahan dimasa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Balai POM di Kendari berusaha meningkatkan kinerja pengawasan; mendorong pengembangan dan penggunaan metode termutakhir; dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan Masyarakat. Komitmen dan inisiatif kepemimpinan telah memposisikan Balai POM di Kendari menjadi organisasi pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ketat, adil, dan transparan, serta responsif terhadap perkembangan dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

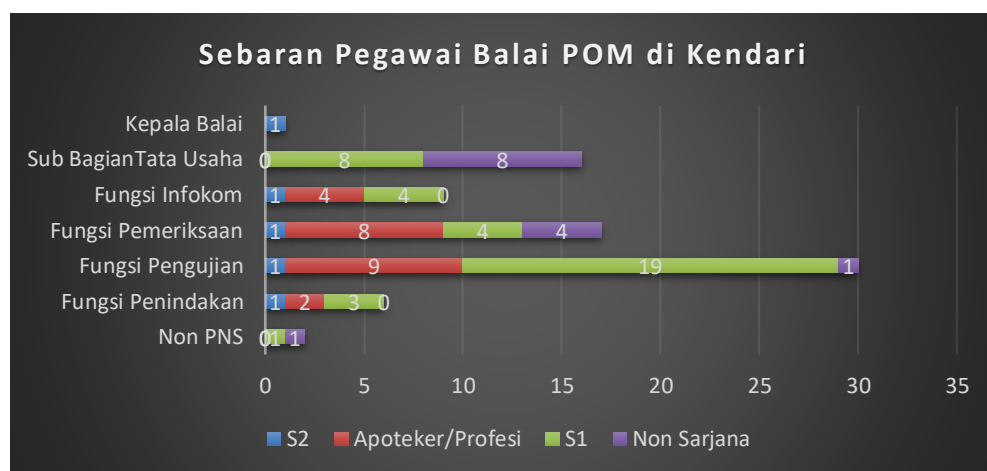
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM di Kendari melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Kendari merupakan pengungkit dalam pencapaian

sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Wujud komitmen BPOM di Kendari dalam pelaksanaan RB adalah pencanangan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) sejak Tahun 2019 dan perolehan predikat WBK dari Kemenpan RB pada Tahun 2024. Bentuk komitmen dalam pelaksanaan RB dilakukan BPOM di Kendari melalui peningkatan pelayanan publik yang prima kepada Masyarakat. Berbagai inovasi dikembangkan BPOM di Kendari untuk menangkap harapan dan ekspektasi Masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan bidang Obat dan Makanan. Penghargaan yang telah diperoleh Balai POM di Kendari sebagai bukti komitmen pimpinan dan pegawai adalah:

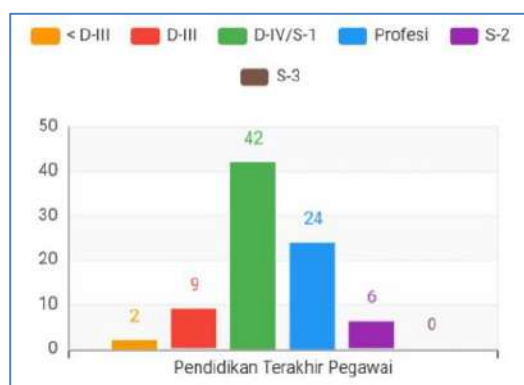
- a. Perolehan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada Tahun 2024;
- b. Predikat Pelayanan Publik Prima dari BPOM sejak Tahun 2022;
- c. Peringkat Terbaik III untuk Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat BPOM Tahun 2024;
- d. Penghargaan Implementasi Nominal Transaksi KKP Terbaik I dari Kanwil DJPb Prov Sultra Tahun 2024;
- e. Penghargaan Implementasi Jumlah Transaksi KKP Terbaik I dari Kanwil DJPb Prov Sultra Tahun 2024;
- f. Penghargaan Implementasi Penggunaan KKP Terbaik I dari Kanwil KPPN Kendari Tahun 2024;
- g. Pegawai Berprestasi Favorit Tahun 2023 dan Nominator enam besar Pegawai Berprestasi Tahun 2024 Tingkat BPOM;
- h. Juara III Regional Tengah Lomba Pasar Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023;
- i. Juara II Regional Timur Lomba Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2023;
- j. Nominator Lomba Desa Pangan Aman Tahun 2023-2024;

- 2) **Pegawai BPOM di Kendari yang kompeten dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** Pelaksanaan rencana strategis BPOM di Kendari 2025-2029 membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya,

memastikan BPOM di Kendari dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Kendari memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Selain itu, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam perkembangan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Kendari harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 17 Sebaran Pegawai BPOM di Kendari Tahun 2024



Gambar 18 Tingkat Pendidikan Pegawai BPOM di Kendari

Balai POM di Kendari didukung pegawai yang berdedikasi dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang

modern, kualitas sumber daya manusia di Balai POM di Kendari mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Kendari merupakan aset penting dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Sulawesi Tenggara, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya.

Berdasarkan data sebaran pegawai BPOM di Kendari menunjukkan bahwa pada berbagai fungsi/sub bagian penempatan pegawai, telah merata berdasarkan jenjang pendidikannya. Data tingkat pendidikan menunjukkan pegawai BPOM di Kendari didominasi pada jenjang S1 dan selanjutnya jenjang profesi. Jika ditinjau dari latar belakang rumpun pendidikan pegawai BPOM di Kendari bervariasi dari berbagai bidang keilmuan. Rumpun terbanyak dari bidang Farmasi dan Ilmu Hayati sehingga dapat mendukung analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan.



Gambar 19 Rumpun Pendidikan Pegawai BPOM di Kendari

Untuk dapat melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi spesifik tersebut, BPOM di Kendari memiliki 75 Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Jenjang jabatan fungsional didominasi Ahli Pertama sebanyak 29 pegawai; kemudian 23 pegawai untuk jenjang di atasnya yaitu Ahli Muda dan 12 pegawai dengan jenjang Ahli Madya. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM di Kendari telah didukung oleh sumberdaya yang memadai dalam

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.



Gambar 20 Jabatan Fungsional Pegawai BPOM di Kendari

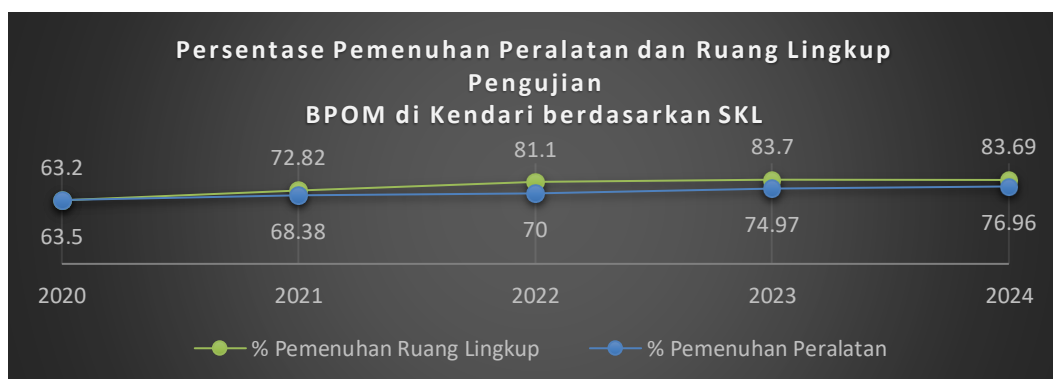
Balai POM di Kendari secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan hingga pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi regulasi pengawasan. SDM Balai POM di Kendari tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini menegaskan peran Balai POM di Kendari sebagai lembaga yang tidak hanya merespons masalah yang ada tetapi juga secara proaktif mencegah munculnya masalah baru, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur utama pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama, melalui penguatan manajemen talenta untuk menyiapkan kader kepemimpinan maupun expertise dalam mengawal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkualitas. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM di Kendari periode 2025-2029 dilakukan melalui 1] Implementasi sistem merit secara konsisten; 2] mplementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten; 3] Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi.; dan 4] Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital. BPOM di Kendari terus memastikan bahwa SDM aparatur nya memiliki kualifikasi dan keahlian

global serta kemampuan literasi digital untuk mendukung program pembangunan.

3) Peralatan laboratorium dan metode pengujian yang termutakhir

BPOM memiliki jaringan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM serta satu laboratorium utama di Kantor Pusat BPOM yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Sistem regionalisasi laboratorium memungkinkan BPOM untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek produk obat dan makanan, mulai dari analisis mikrobiologis hingga pengujian kimia dan toksikologi. Kemampuan ini memastikan bahwa BPOM tidak hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berdampak pada kesehatan masyarakat. Balai POM di Kendari mendukung upaya regionalisasi laboratorium terpadu dengan memperkuat jaringan pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Region V. Balai POM di Kendari memiliki laboratorium pengujian sebagai tulang punggung sistem pengawasan. Laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar. Hasil pengujian laboratorium dibutuhkan secara cepat dan valid untuk penjaminan mutu, jika produk tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat.



Gambar 21 Pemenuhan Peralatan dan Ruang Lingkup Pengujian BPOM di Kendari (Sumber: Data SKL 2020-2024)

Kegiatan berlaboratorium dalam rangka pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan secara kimia dan mikrobiologi memerlukan berbagai peralatan utama maupun peralatan pendukung dan suku cadang. Ketersediaan peralatan berkontribusi penting pada kemampuan pengujian di laboratorium.

Standar Ruang Lingkup adalah acuan yang digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian kimia dan biologi, terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif (nappza), obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, mikrobiologi dan biologi molekuler yang menggambarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium. Salah satu aspek yang harus dilakukan dalam meningkatkan kemampuan laboratorium adalah bertambahnya jenis sampel dan jumlah parameter pengujian yang dilakukan. Hal ini secara langsung akan memperluas lingkup pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Kendari, agar mampu melaksanakan perlindungan kepada masyarakat secara optimal.

Standar peralatan dan standar ruang lingkup diperlukan sebagai acuan untuk dalam pemenuhan baik alat laboratorium maupun ruang lingkup pengujian untuk mendukung tercapainya Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Selama Tahun 2020-2024 terjadi peningkatan pemenuhan standar peralatan dan ruang lingkup pengujian BPOM di Kendari. Hal ini membuktikan bahwa Balai POM di Kendari berkomitmen dalam penjaminan mutu dan validitas hasil pengujian dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi.

4) BPOM di Kendari telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 9001:2018; dan ISO/IEC 37001:2016;

Balai POM di Kendari berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas kelembagaan melalui penjaminan mutu sistem laboratorium, proses bisnis dan integritas pegawai melalui akreditasi ISO/IEC/ 17025:2017; ISO/IEC 9001:2018; dan ISO/IEC 37001:2016. Laboratorium pengujian Balai POM di Kendari telah mendapatkan sertifikat ISO/IEC 17025 sejak Tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2011 Balai POM di Kendari mendapatkan akreditasi ISO/IEC 9001; dan pada tahun 2023 mendapatkan akreditasi ISO/IEC

37001.

Dengan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 BPOM di Kendari memastikan bahwa laboratorium memiliki sistem manajemen yang profesional dan menghasilkan data yang valid. Akreditasi ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan bahwa hasil pengujian dan kalibrasi yang dilakukan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, akreditasi ini juga membantu laboratorium BPOM di Kendari meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis. Akreditasi ISO/IEC 17025:2017 merupakan langkah strategis BPOM di Kendari dalam meningkatkan mutu, kepercayaan, serta daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Perolehan akreditasi ISO 37001:2016 menunjukkan BPOM di Kendari telah membangun, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki sistem manajemen yang efektif dalam menangani risiko penyuapan. Standar ini menyediakan panduan bagi BPOM di Kendari untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang sesuai guna mencegah dan menangani tindakan penyuapan di semua aspek operasionalnya. Dengan demikian, BPOM di Kendari dapat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (undang-undang anti-penyuapan) sehingga dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan di mata pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sedangkan akreditasi ISO/IEC 9001:2018 membuktikan komitmen BPOM di Kendari untuk meningkatkan efektivitas manajemen mutu dengan pendekatan berbasis proses (*process-based approach*) untuk mencapai perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Sehingga, organisasi memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas. Struktur organisasi BPOM di Kendari tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

Penatalaksanaan BPOM di Kendari telah dijalankan dan diintegrasikan

dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

5) Tersedia pedoman/landasan hukum dan regulasi sediaan farmasi dan pangan olahan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

Penyelenggaraan tugas Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Kendari didukung dengan adanya pedoman yang kuat dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan BPOM. Saat ini terdapat 167 Peraturan BPOM yang terdiri dari 39 Peraturan terkait dukungan manajemen, inspektorat dan penindakan, serta 128 Peraturan BPOM terkait pengawasan obat dan makanan, termasuk perizinan berusaha. Dukungan regulasi yang kuat dapat menjadi pondasi dalam pelaksanaan pengawasan yang optimal dan efektif.

Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM, diantaranya meliputi:

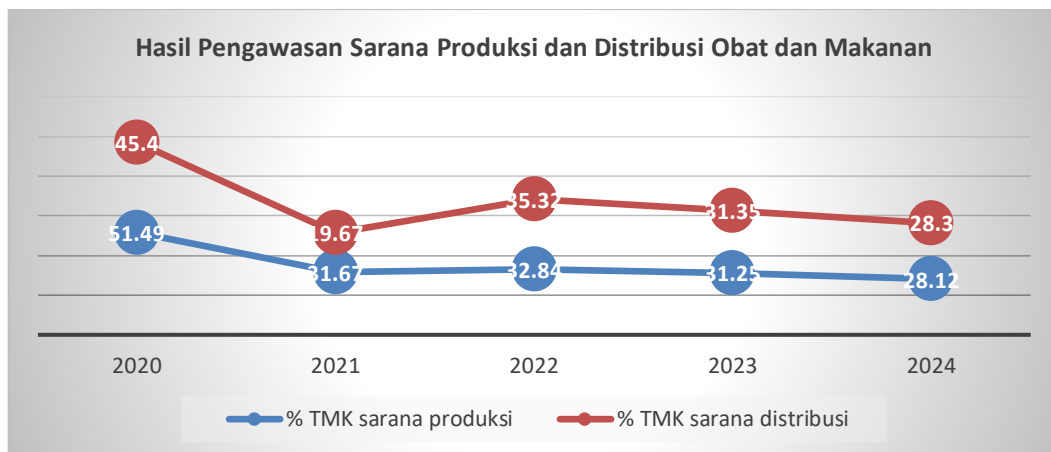
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.

Pelaksanaan kegiatan penindakan sebagai upaya penegakan hukum kejahatan bidang Obat dan Makanan saat ini didasarkan pada Undang-Undang No. 36 tahun 2019 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.18

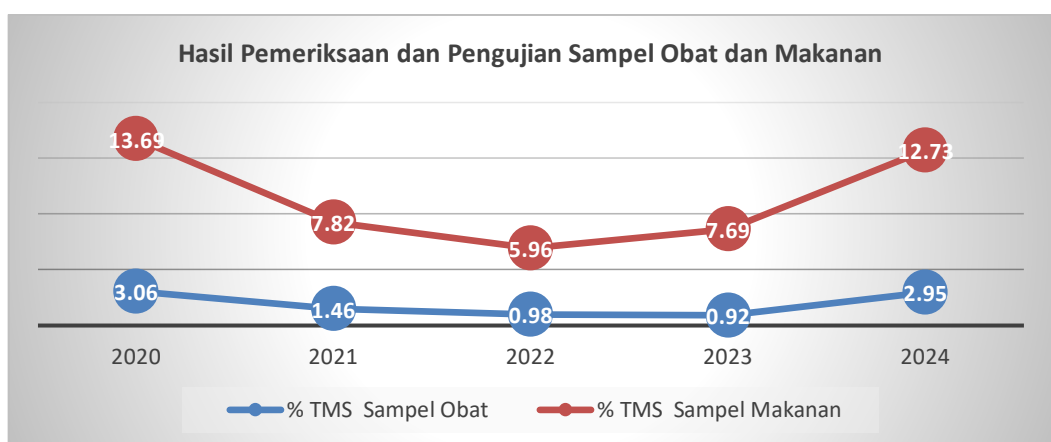
tahun 2012 tentang Pangan. Salah satu bentuk perkuatan regulasi adalah dicantumkan fungsi dan kewenangan terkait cegah tangkal, intelijen dan penyidikan termasuk perluasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM sebagaimana tertuang dalam RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2018/2019 yang ditetapkan dengan Keputusan DPR Nomor 19/DPR-RI/2018-2019. Penyesuaian regulasi disertai kerja sama dan komitmen yang lebih erat antara BPOM dengan pemangku kepentingan lain menjadi poin penting keberhasilan pemberantasan peredaran obat ilegal termasuk penyalahgunaan obat bukan hanya dari sisi penindakan melainkan juga dari sisi pencegahan dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Komitmen tinggi Balai POM di Kendari untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan, ditunjang oleh beberapa kekuatan internal diantaranya:

- a) SDM dengan latar belakang multi disiplin dan komitmen BPOM di Kendari dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
 - b) Jejaring kuat BPOM di Kendari dengan unsur Criminal Justice System dari tingkat pusat hingga daerah;
 - c) Tersedia pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
 - d) Tersedianya landasan hukum untuk melakukan Penindakan terhadap pelanggaran kejahatan bidang Obat dan Makanan; dan
- Adanya kewenangan PPNS yang luas dan berlaku secara nasional



Gambar 22 Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi BPOM di Kendari

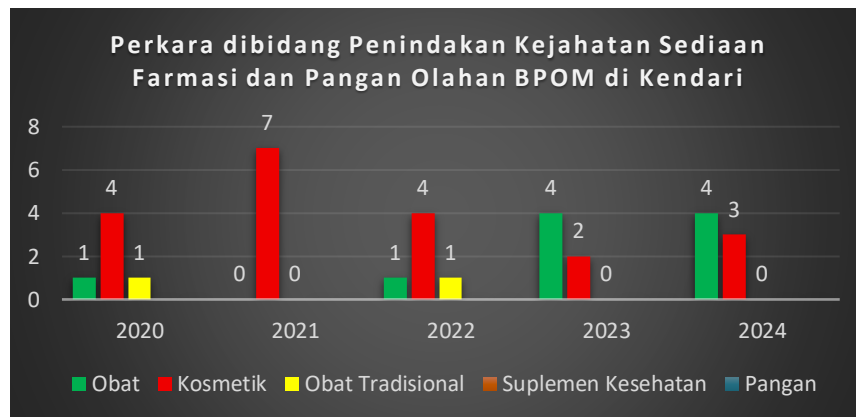


Gambar 23 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Obat dan Makanan BPOM di Kendari

BPOM di Kendari telah melaksanakan pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan di Sulawesi Tenggara secara komprehensif; ditunjukkan dengan hasil pengawasan selama periode 2020-2024 yang mengalami penurunan terhadap persentase sarana yang TMK. Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Obat dan Makanan selama periode 2020-2024 juga menunjukkan bahwa BPOM di Kendari telah melaksanakan fungsi pemeriksaan dan pengujian sesuai pedoman dan regulasi sehingga mampu menjaring produk yang TMS untuk melindungi masyarakat.

Hasil penindakan kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan oleh BPOM di Kendari selama Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-

undangan.



Gambar 24 Jumlah Perkara BPOM di Kendari

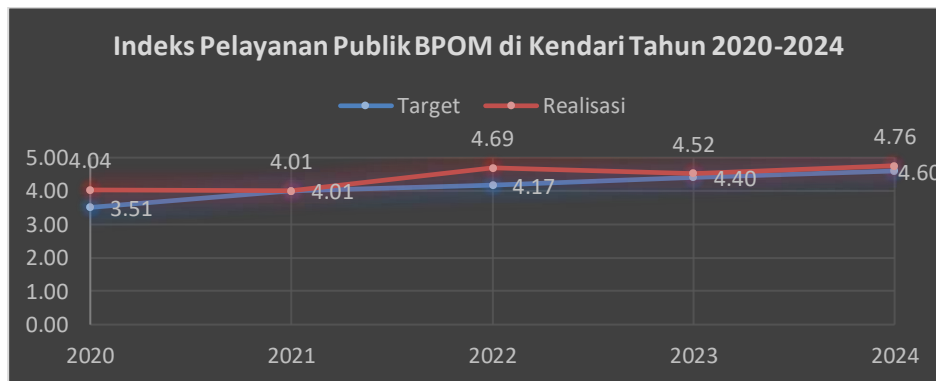
Balai POM di Kendari telah melaksanakan pengawasan dan penindakan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga masyarakat di wilayah pengawasan BPOM di Kendari terlindungi konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan (TMS) dan dari sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

6) Pelayanan Publik Balai POM di Kendari Telah Memperoleh Predikat pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sejak tahun 2022 Balai POM di Kendari telah meraih IPP dengan predikat Pelayanan Prima. Pencapaian tersebut didukung beberapa upaya antara lain penyusunan standar pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas, penyempurnaan inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan lebih kepada stakeholder, penyediaan sarana dan prasarana dan konsistensi penerapan budaya 5S.

Salah satu bentuk upaya integritas penyelenggaraan pelayanan publik adalah Pembangunan Zona Integritas. Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) diberikan kepada BPOM di Kendari pada Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Predikat ini menunjukkan komitmen BPOM di Kendari dalam memenuhi sebagian besar program dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.



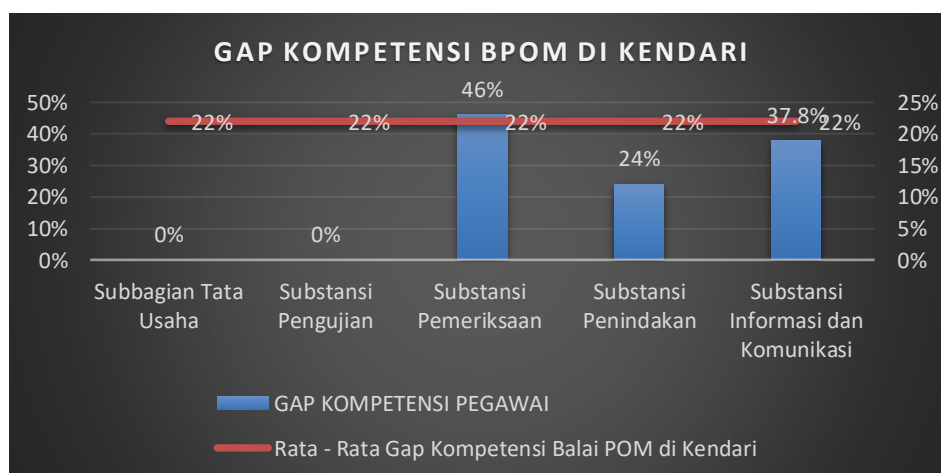
Gambar 25 Indeks Pelayanan Publik BPOM di Kendari

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif, maka Balai POM di Kendari memiliki inovasi berupa Sistem Informasi Anti Gratifikasi (SINGA). Melalui inovasi ini, sarana dapat melakukan gratifikasi secara *online* yang dilakukan melalui gawai. Inovasi ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelapor perihal gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selain inovasi *SINGA*, BPOM di Kendari juga memiliki inovasi Aduan Masyarakat (ADUMAS) yang menjamin hak masyarakat dalam melakukan pengaduan dalam hal pelayanan dari petugas pelayanan publik. Melalui *ADUMAS*, BPOM di Kendari menghadirkan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai atau ketidakpuasan terhadap pelayanan penyelenggara pelayanan publik, sehingga petugas pelayanan publik mengelola pengaduan publik secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam penyampaian pengaduan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua inovasi tersebut mendukung integritas pelayanan publik yang menunjukkan bahwa BPOM di Kendari berkomitmen dalam melaksanakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

1) Terdapat GAP kompetensi

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai BPOM di Kendari menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja sehingga jika tidak diatasi dengan baik dapat menurunkan kualitas dan konsistensi dalam kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tenggara. Fungsi pengawasan yang efektif menuntut pemahaman yang mendalam dan kompetensi yang merata di seluruh unit kerja, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Ketidakterpenuhinya hal ini berisiko menciptakan celah dalam sistem pengawasan yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan masyarakat.



Gambar 26 GAP Kompetensi BPOM di Kendari

Berdasarkan hasil pengukuran gap kompetensi pegawai BPOM di Kendari, masih terdapat gap yang signifikan pada ketiga fungsi yaitu Pemeriksaan, Infokom dan Penindakan. Kesenjangan kompetensi memberikan pengaruh pada pelaksanaan tugas SDM dalam melakukan kegiatan pengawasan, KIE dan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM di Kendari harus berupaya menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut. Pendekatan yang dapat diambil mencakup pelatihan yang terstruktur, merata, dan berkelanjutan. Hal ini

juga sejalan dengan implementasi sistem merit di lingkungan BPOM, di mana aspek kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu pilar utama, selain aspek kualifikasi dan kinerja.

2) Keterbatasan dan distribusi Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi BPOM di Kendari berdampak langsung pada kemampuan organisasi untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh di Sulawesi Tenggara. Peningkatan jumlah produk beredar dan kenaikan jumlah sarana harus diimbangi dengan ketersediaan petugas agar tugas pengawasan dapat berjalan efektif dan optimal. Selain itu keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas BPOM di Kendari untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk yang aman dan berkualitas. Kelemahan ini dapat berdampak pada operasional internal BPOM di Kendari, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik di Sulawesi Tenggara.

Tabel 3 ABK BPOM di Kendari Tahun 2024

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Kendari	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	0	100%
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	0	0	0	100%
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	1	0	1	0%
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	0	0	0	100%
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	1	0	100%
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	0	100%
8	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	1	0	100%
9	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1	0%
10	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1	0%
11	Arsiparis Mahir	1	0	1	0%
12	Arsiparis Penyelia	1	1	0	100%
13	Arsiparis Terampil	1	1	0	100%
14	Penata Laksana Barang Terampil	3	0	3	0%
15	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	12	12	0	100%
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	32	20	12	62.5%

17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	33	25	8	76%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	2	-2	100%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	3	-3	100%
20	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	-1	100%
21	Perencana Ahli Madya	1	0	1	0%
22	Perencana Ahli Muda	2	0	2	0%
23	Perencana Ahli Pertama	2	2	0	100%
24	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0	100%
25	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	1	0%
26	Pranata Keuangan APBN Terampil	2	2	0	100%
27	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0	100%
28	Pranata Komputer Terampil	1	0	1	0%
29	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1	0%
30	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0	100%
31	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	-1	100%

BPOM di Kendari masih memiliki beberapa formasi yang belum terisi, terutama pada subbagian tata usaha. Beberapa pegawai pada semua fungsi dan Subbag TU akan memasuki masa purnabakti dalam kurun waktu 0-5 tahun mendatang. Jika tidak direspon secara tepat, BPOM di Kendari berisiko kehilangan beberapa kompetensi sehingga akan mengganggu kinerja pengawasan.

Balai POM di Kendari harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten agar dapat mendukung pelaksanaan pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tenggara. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

3) Data belum terintegrasi secara optimal dalam bank data

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BPOM secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital harus dilakukan BPOM di Kendari melalui:

- a) Ketersediaan kompetensi SDM yang mumpuni;
- b) Sistem basis data dan informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan Keputusan;
- c) Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan yang dihadapi BPOM di Kendari adalah belum terintegrasinya aplikasi yang tersedia, sehingga data dasar tersebar di masing-masing substansi. Data-data ini harus diselaraskan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat agar menjadi sumber informasi yang penting dan bermakna sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan. BPOM di Kendari perlu melakukan upaya pengembangan data Pengawasan yang terintegrasi agar dapat dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

4) Pemenuhan Gedung Laboratorium Sesuai Standar

Bangunan laboratorium yang dirancang harus mempertimbangkan faktor keselamatan, ergonomis, alur kerja, spesifikasi material dan peralatan sebagai kebutuhan standar laboratorium. Akibat yang dapat ditimbulkan dengan tidak terpenuhinya salah satu faktor tersebut adalah tidak terciptanya lingkungan ideal yang mendukung aktivitas pengujian sehingga dapat berdampak pada tingkat kepercayaan hasil atau nilai yang dikeluarkan oleh laboratorium.

Gedung laboratorium merupakan salah satu standar dalam pemenuhan sarana dan prasarana di lingkup BPOM sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 277 Tahun 2024 tentang *Grand Design* Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan UPT BPOM. Lebih spesifik, desain gedung laboratorium terdapat dalam Panduan Desain Bangunan Laboratorium yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Nasional (PPPOMN). Dalam panduan tersebut, secara umum laboratorium standar harus memenuhi kebutuhan arsitektural, kebutuhan mekanikal, kebutuhan elektrik dan kebutuhan furnitur. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk menciptakan kondisi ideal dalam pengujian.

Laboratorium BPOM di Kendari telah terakreditasi ISO/IEC/IEC 17025:2017 dan merupakan salah satu kekuatan dalam melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan. Namun, gedung laboratorium belum memenuhi persyaratan sarana dan prasarana sehingga memerlukan peningkatan (status gedung sampai Tahun 2024 adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP). Kondisi sistem kelistrikan, grounding, sistem tata udara, sisten pencahayaan dan tata ruang laboratorium kurang memenuhi persyaratan sesuai pedoman PPPOMN. Hal ini berisiko 1] terganggunya proses pengujian, 2] kerusakan peralatan, dan 3] risiko terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pemenuhan akan gedung laboratorium yang sesuai standar bagi BPOM di Kendari sangat penting untuk tetap menjamin mutu pengujian sesuai standar; untuk tetap menghadirkan kemampuan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang unggul, inovatif dan adaptip terhadap perubahan; serta menjamin K3 bagi penguji di laboratorium. Oleh sebab itu BPOM di Kendari perlu melakukan peningkatan kapabilitas laboratorium melalui investasi dalam infrastruktur laboratorium serta pengembangan fasilitas laboratorium.

1.2.3. Peluang (*Opportunity*)

1) **Adaptasi perkembangan teknologi informasi untuk mendukung implementasi *good governance* dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;**

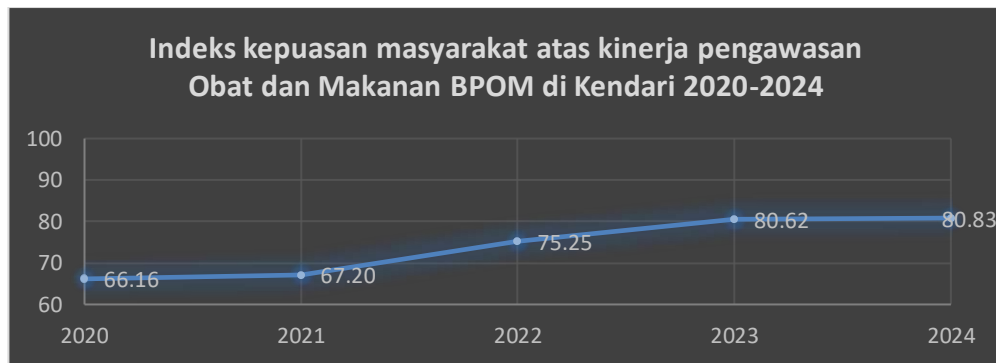
Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM di Kendari dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur

kerjanya.

Balai POM di Kendari menangkap peluang ini melalui digitalisasi dan kemudahan dalam pemberian pelayanan publik. Berbagai inovasi pelayanan publik basis digital dikembangkan untuk memenuhi harapan Masyarakat Sulawesi Tenggara. Peningkatan kompetensi pegawai BPOM di Kendari terkait teknologi informasi dan digitalisasi terus dilakukan melalui pembelajaran *e-learning* maupun *onsite*. Kemampuan dalam pemanfaatan teknologi AI diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan yang dibutuhkan dalam pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sehingga secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. BPOM di Kendari dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi, pelaporan dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini dapat mengurangi beban administratif serta meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan Keputusan.

2) Meningkatnya ekspektasi masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap kinerja pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari produk yang berbahaya bagi kesehatan. Hasil Indeks kepuasan masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap kinerja pengawasan BPOM di Kendari selama periode 2020-2024 menunjukkan kenaikan signifikan. Kepuasan Masyarakat tersebut sejalan dengan harapan adanya peningkatan kualitas kinerja BPOM di Kendari baik dalam pengawasan produk dan sarana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; pengujian; sosialisasi dan KIE; serta dalam pendampingan penerbitan izin edar.



Gambar 27 Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM di Kendari

BPOM di Kendari harus dapat menangkap peluang harapan masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menjadi aspek pertimbangan yang penting menyusun perencanaan kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang optimal.

3) Pertumbuhan Industri Pangan Olahan dan Sediaan Farmasi sebagai momentum Pengawasan

Pertumbuhan pelaku usaha sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkembang pesat merupakan peluang bagi Balai POM di Kendari untuk melakukan intensifikasi pengawasannya. Di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan pelaku usaha Pangan Olahan di Sulawesi Tenggara meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan permohonan izin edar produk Pangan Olahan selama 2020-2024. Selain itu, adanya program DAK Non Fisik kepada pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, mendorong peningkatan UMKM Pangan melalui kolaborasi pengawasan produk Pangan Olahan oleh pemda terkait.

Balai POM di Kendari berada pada posisi strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar di Sulawesi Tenggara memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Balai POM di Kendari hadir bagi konsumen dengan memberikan jaminan akses ke produk yang aman dan berkualitas; dan bagi pelaku usaha memberikan kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil melalui pendampingan yang transparan dan akuntabel.

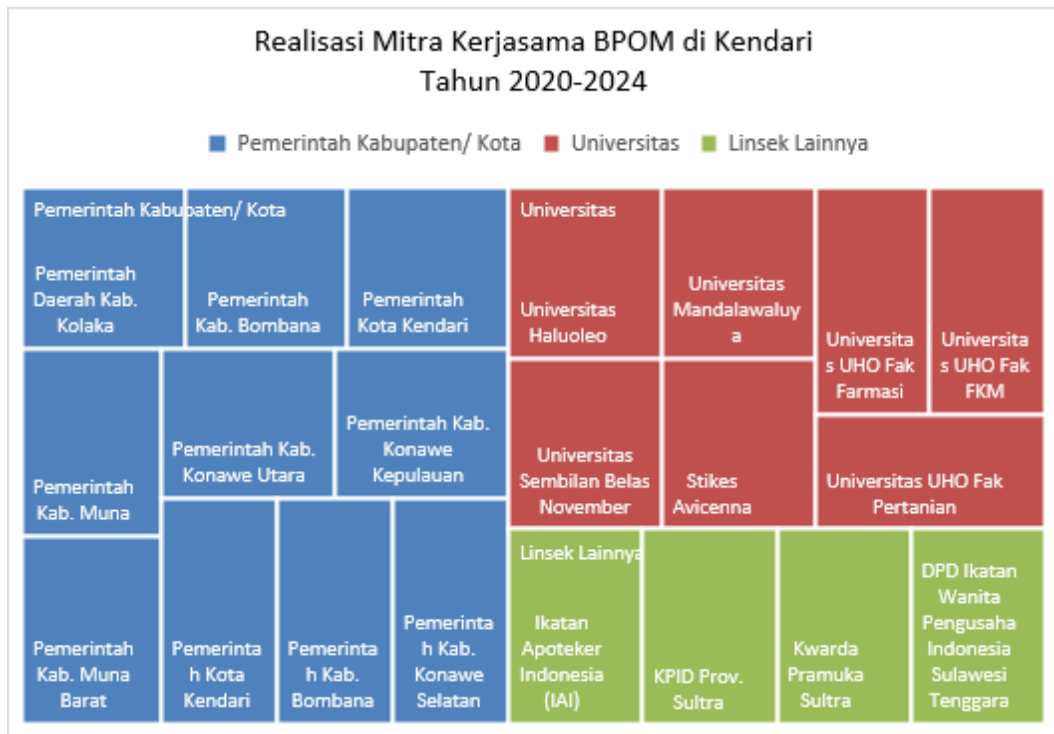
Balai POM di Kendari berupaya menangkap peluang ini dengan adanya berbagai inovasi pendampingan UMKM. BPOM di Kendari memastikan

kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan dan kemudahan perizinan; sehingga membantu produk Sulawesi Tenggara memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya BPOM di Kendari untuk hadir menjadi instansi yang bergerak turut serta dalam meningkatkan perekonomian melalui kemudahan pemberian izin edar terhadap produk; dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tenggara yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4) Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif.

Balai POM di Kendari menyadari dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Kendari membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (OPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Kendari maupun pemangku kepentingan.



Gambar 28 Mitra Kerjasama BPOM di Kendari Tahun 2020-2024

Beberapa jejaring yang kerja telah terbentuk yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/ Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian (JLP), Satgas Pangan Sulawesi Tenggara, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah, dan *Criminal Justice System* (CJS). Peluang kolaborasi yang telah ada harus terus ditingkatkan agar tercipta harmonisasi dalam pelaksanaan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tenggara.

5) Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak aman. BPOM di Kendari menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat Sulawesi Tenggara melalui sosialisasi, penyuluhan dan pemanfaatan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial. Edukasi publik dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu, sehingga berimplikasi terhadap

peningkatan kesadaran masyarakat. Pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di Sulawesi Tenggara. Hasil *awareness index* Masyarakat Sulawesi Tenggara menunjukkan kenaikan signifikan selama 2020-2024.



Gambar 29 Awareness Index BPOM di Kendari

Peluang peningkatan kesadaran Masyarakat Sulawesi Tenggara ini harus dimanfaatkan BPOM di Kendari dengan baik, untuk aktif berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang lebih efektif dan responsif di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk dapat terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat hingga tingkat perorangan, BPOM di Kendari membuat inovasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Kapal Penyebrangan dan Pelabuhan (KIE KAPEM PLUS) sejak Tahun 2022. Meningkatnya masyarakat yang teredukasi tentang keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan proaktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran, memungkinkan BPOM di Kendari untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Hal ini dapat memperkuat citra BPOM di Kendari sebagai instansi pengawas yang kompeten dan terpercaya dimata publik Sulawesi Tenggara. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tenggara.

1.2.4. Ancaman (*Threats*)

1) Kondisi Geografi Sulawesi Tenggara dengan Keberagaman Sosial Kultural masyarakat

Demografi, epidomologi dan kondisi sosio-kultural mempengaruhi jenis dan perilaku konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan. Perilaku konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak sesuai ketentuan karena kurangnya kesadaran, menjadi ancaman dalam pemberian edukasi terhadap Penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berkualitas.

Sulawesi Tenggara terdiri atas kepulauan budaya maritim yang kental. Identitas sosialnya dibentuk oleh komunitas Tolaki, Muna, Buton, Moronene, Kulisusu, serta komunitas pesisir seperti Bajo, berdampingan dengan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia Timur. Keberagaman identitas sosial ini menunjukkan perbedaan budaya dan bahasa. Sebagian besar penduduk tersebut hanya memahami bahasa daerah mereka dan kurang memahami Bahasa Indonesia. Ketebatasan pendidikan hanya sampai sekolah dasar serta pola pikir yang hanya mendengarkan sesama suku (tokoh adat) dan bahasa.

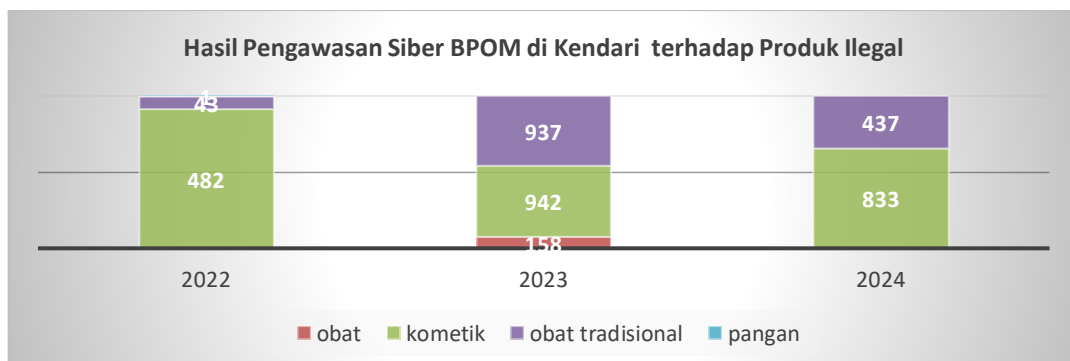
Karakteristik geografis Sulawesi Tenggara yang unik, memiliki tantangan tersendiri dalam hal konektivitas, distribusi informasi, dan pemerataan akses terhadap program-program pemerintah maupun swasta. Hal ini dapat menimbulkan *gap* dalam penerimaan dan pendistribusian informasi tentang sediaan farmasi dan pangan olahan. Masyarakat di pulau-pulau seringkali menjadi yang terakhir menerima informasi penting, seperti bahaya kosmetik, penyalahgunaan obat, sistem keamanan pangan, cara melakukan cek sediaan farmasi dan pangan olahan, bahaya produk yang tidak memenuhi syarat yang berdampak pada kesehatan.

Kondisi geografis dan sosial-kultural ini menjadi tantangan BPOM di Kendari dalam melakukan Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara menyeluruh di Sulawesi Tenggara. Sarana produksi dan distribusi serta sediaan farmasi dan pangan olahan yang tersebar hingga di pulau terpencil meningkatkan risiko penundaan dalam inspeksi dan pengawasan. Hal ini jika tidak diatasi dengan baik memungkinkan untuk beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas di

masayarakat lebih lama. Selain itu beragam suku dan budaya menjadi tantangan dalam KIE dan sosialisasi yang efektif. Perkembangan tren kesehatan dan demografi juga menjadi tantangan petugas dalam meningkatkan pemahaman yang mendalam untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

2) Peredaran sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal melalui e-commerce semakin cepat dan informasi *hoax* yang mudah diterima pasar

Perkembangan teknologi secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli sediaan farmasi dan pangan olahan. *E-commerce* menjadi pintu kemudahan akses dengan menawarkan beragam sediaan farmasi dan pangan olahan secara mudah dan cepat. Pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan, mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Hal ini menjadi tantangan Balai POM di Kendari dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Tantangan yang besar ini harus mampu diatasi BPOM di Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai intansi pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan agar mampu menjamin perlindungan Masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap kewanamanan dan mutu produk.



Gambar 30 Hasil Pengawasan Siber BPOM di Kendari terhadap Produk Ilegal dan telah ditakedown

Selain ancaman dari perdagangan produk ilegal melalui *e-commerce*, perkembangan teknologi memberikan ancaman bagi Balai POM di Kendari terhadap penyebaran berita *hoax* tentang sediaan farmasi dan pangan olahan. Kemudahan akses terhadap internet dan informasi, memungkinkan berkembangnya informasi-informasi yang profokatif dan tidak benar terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan baik di lingkup Sulawesi Tenggara maupun secara nasional.

Hal ini menjadi ancaman tersebarnya berbagai iklan produk yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu informasi-informasi *hoax* dan kontradiksi dengan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan akan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Perkembangan teknologi ini harus diatasi melalui peningkatan KIE yang lebih inovatif sehingga tidak menimbulkan risiko pemahaman dan kesadaran masyarakat yang keliru terhadap informasi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3) Perubahan regulasi terkait kemudahan izin berusaha OSS sehingga menjadi celah bagi UMKM/ pelaku usaha tidak memenuhi komitmen

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh BPOM menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan. BPOM harus menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri (usaha).

Di Sulawesi Tenggara penerimaan terhadap kebijakan Obat dan Makanan menjadi tantangan yang perlu dikelola dengan baik oleh Balai POM di Kendari. Perubahan regulasi dalam kemudahan perizinan membuka celah bagi pelaku usaha untuk tidak memenuhi komitmen pemenuhan standarnya, sehingga akan menyulitkan dalam pengawasan produk *postmarket*. Disisi lain perubahan regulasi justru memunculkan oknum

percaloan oleh masyarakat dalam pengurusan penerbitan izin edar. Balai POM di Kendari harus dapat menjawab tantangan ini dan menganalisis agar tidak menjadi ancaman serius bagi organisasi. BPOM di Kendari.

4) Resistensi Antimikroba /*Antimicrobial Resistance* (AMR)

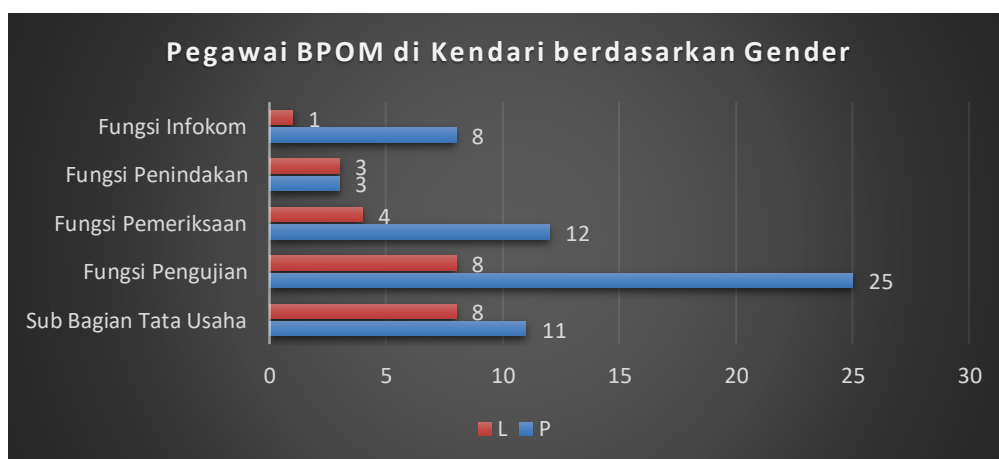
Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan obat dan pangan di Indonesia. Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam pengobatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, akan mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah: terancamnya efektivitas terapi; memperbesar risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani; menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan tanaman yang terpapar antimikroba bahkan menimbulkan kematian. Selain itu, hal ini juga akan berdampak bagi meningkatnya beban biaya kesehatan bagi pemerintah. Bagi BPOM, AMR bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga merupakan tantangan lintas sektor yang harus dihadapi dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pengawasan akan menjadi kunci. Langkah strategis yang harus dilakukan antara lain meliputi: (a) penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya, termasuk pelacakan residu pada produk pangan; (b) digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan, dan analisis data penggunaan antimikroba di seluruh rantai pasok; (c) kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan one health bersama kementerian terkait, pelaku usaha, dan masyarakat; (d) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk memastikan mutu produk obat dan pangan yang beredar serta (e) edukasi dan komunikasi risiko yang masif kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba. Tanpa penguatan peran BPOM sebagai garda depan pengawasan obat dan makanan, AMR dapat menjadi krisis kesehatan nasional yang memperlemah fondasi ketahanan sistem kesehatan dan pangan Indonesia.

BPOM di Kendari harus mampu menjawab tantangan ini melalui kegiatan:

1] melaksanakan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba; 2] melakukan bimbingan teknis terkait pengendalian antimikroba terhadap penanggung jawab di fasilitas sarana pelayanan kefarmasian; 3] melakukan KIE terhadap masyarakat terkait pengendalian resistensi antimikroba; 4] *join inspection* bersama lintas sektor terkait; dan 5] melakukan publikasi informasi tentang pengendalian resistensi antibiotik.

5) Masih Tingginya Ketimpangan Gender di berbagai Fungsi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki mandat penting dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berkeadilan gender. Namun, masih terdapat ketimpangan gender di lingkungan internal BPOM Kendari yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Isu ketimpangan gender ini bukan semata-mata persoalan jumlah laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut kesetaraan akses terhadap kesempatan, peran dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan budaya organisasi yang sensitif terhadap gender.



Gambar 31 Sebaran Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Gender

Berdasarkan data gender pegawai BPOM di Kendari terhadap struktur organisasi dan pola kerja di BPOM Kendari, ketimpangan gender tampak pada beberapa aspek, yaitu 1] Ketimpangan dalam struktur jabatan dan kepemimpinan; 2] ketimpangan dalam pembagian tugas dan peran; 3]

Akses terbatas terhadap pengembangan kapasitas; 4] Belum semua fungsi kerja memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam tata kelola kelembagaan; 5] Fasilitas pendukung yang kurang memadai.

Ketimpangan gender internal berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan efektivitas pengawasan BPOM Kendari; diantaranya 1] Pengambilan keputusan kurang inklusif; 2] Terbatasnya kapasitas teknis dan regenerasi pengawas terutama pegawai laki-laki; 3] Mempengaruhi kinerja, motivasi dan iklim kerja. Pada fungsi Penindakan, ketimpangan gender mempengaruhi pelaksanaan kegiatan investigasi dan operasi intelijen. Pada fungsi Pemeriksaan, ketimpangan gender berisiko dalam menghadapi pelaku usaha yang tidak kooperatif, dan mengancam keselamatan dan kesehatan petugas.

BPOM di Kendari perlu mengupayakan strategi untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif gender. Dengan memperkuat kebijakan dan praktik kerja yang responsif gender, BPOM Kendari dapat meningkatkan kinerja kelembagaan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap tatakelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

6) Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG



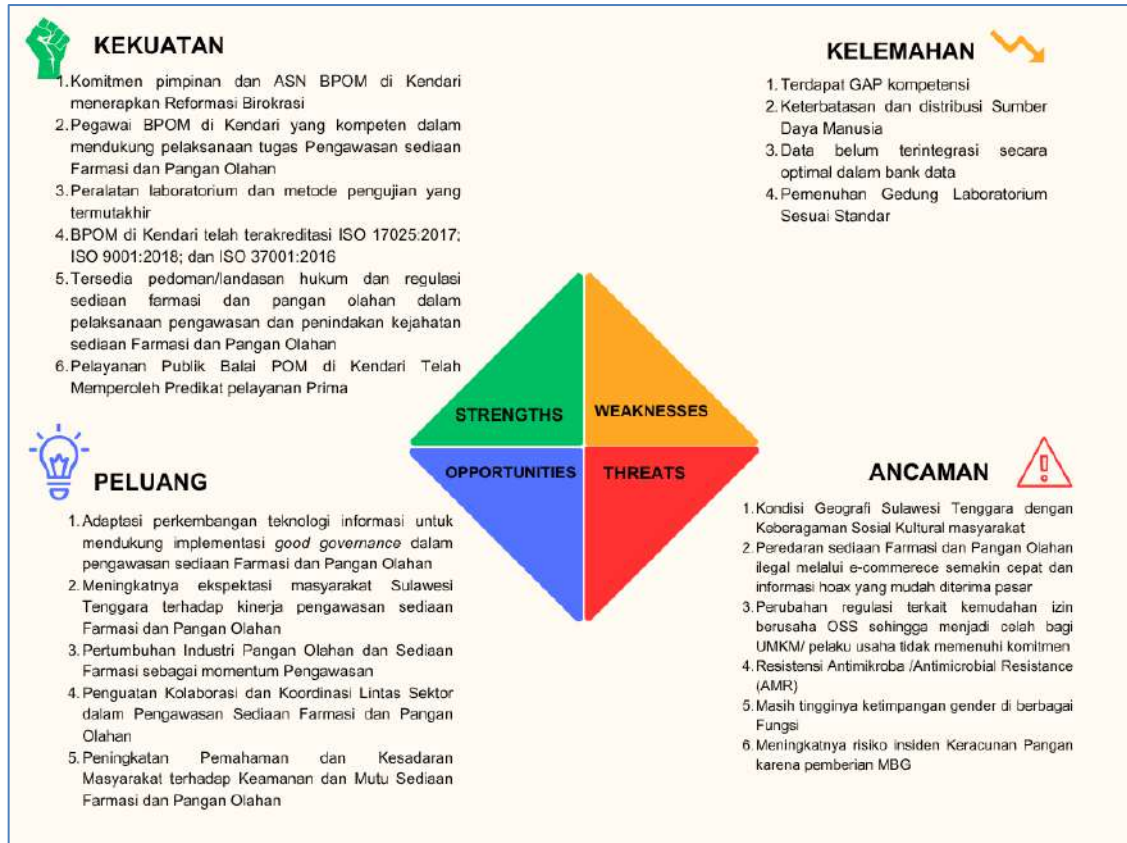
Gambar 32 Hasil Pengujian Sampel KLB BPOM di Kendari 2020-2024

Dalam implementasi Program MBG yang berskala nasional, salah satu ancaman strategis yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya risiko terjadinya insiden/Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Program ini melibatkan rantai yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Skala yang besar dengan pemenuhan standar produksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rantai distribusi yang belum seragam di seluruh wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap insiden keamanan pangan/KLB KP.

Insiden keamanan pangan/KLB KP dapat terjadi akibat kontaminasi dari pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan atau penanganan pangan yang tidak sesuai standar. Selain berdampak langsung terhadap penerima manfaat, insiden semacam ini dapat menimbulkan implikasi sosial yang luas, seperti turunnya tingkat kepercayaan publik, terganggunya proses pembelajaran, hingga berkurangnya legitimasi program MBG sebagai salah satu agenda prioritas nasional.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, isu ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga ancaman strategis terhadap ketahanan program MBG itu sendiri. Oleh karena itu, BPOM memiliki peran vital dalam mengawal keamanan dan mutu pangan pada program MBG melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko.

Di Sulawesi Tenggara, BPOM di Kendari harus menjawab tantangan ini dengan melakukan koordinasi lintas sektor untuk pengawasan melalui 1] inspeksi terhadap penyedia makanan MBG; 2] edukasi dan sosialisasi keamanan pangan terhadap SPPG, pelaku usaha pangan lokal dan UMKM, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendidikan; 3] melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap insiden KLB KP; dan 4] melakukan pengujian terhadap sampel KLB KP.



Gambar 33 Ringkasan Analisis SWOT Balai POM di Kendari

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

- 2.1 VISI
- 2.2 MISI
- 2.3 TUJUAN BALAI POM DI KENDARI
- 2.4 SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI KENDARI



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 VISI

BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi Kesehatan masyarakat Indonesia. Penyusunan Visi BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Balai POM di Kendari sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Gambar 34 Visi BPOM di Kendari 2025-2029

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak

memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 MISI

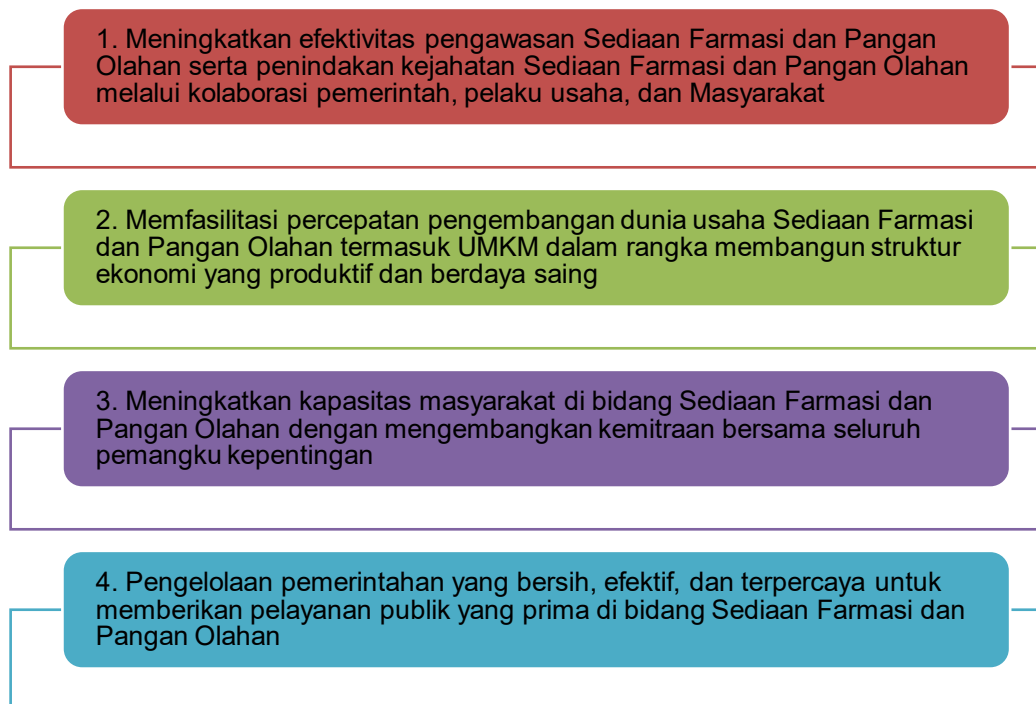
Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana berikut:



Gambar 35 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar tersebut.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.



Gambar 36 Misi Balai POM di Kendari 2025-2029

Penjelasan misi BPOM 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**
Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.
2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**
BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk

pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Kendari sesuai tugas dan sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 TUJUAN BALAI POM DI KENDARI

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**

Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM**

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri

nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada table berikut.

Tabel 4 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Farmasi dan Pangan Olahan					
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Balai POM di Kendari sesuai tugas dan sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.4 SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI KENDARI

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Kendari, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Kendari akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain

itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan

yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Kendari periode 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 5 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Kendari periode 2025-2029

Visi: “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi</i>

Visi:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i>

Visi:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

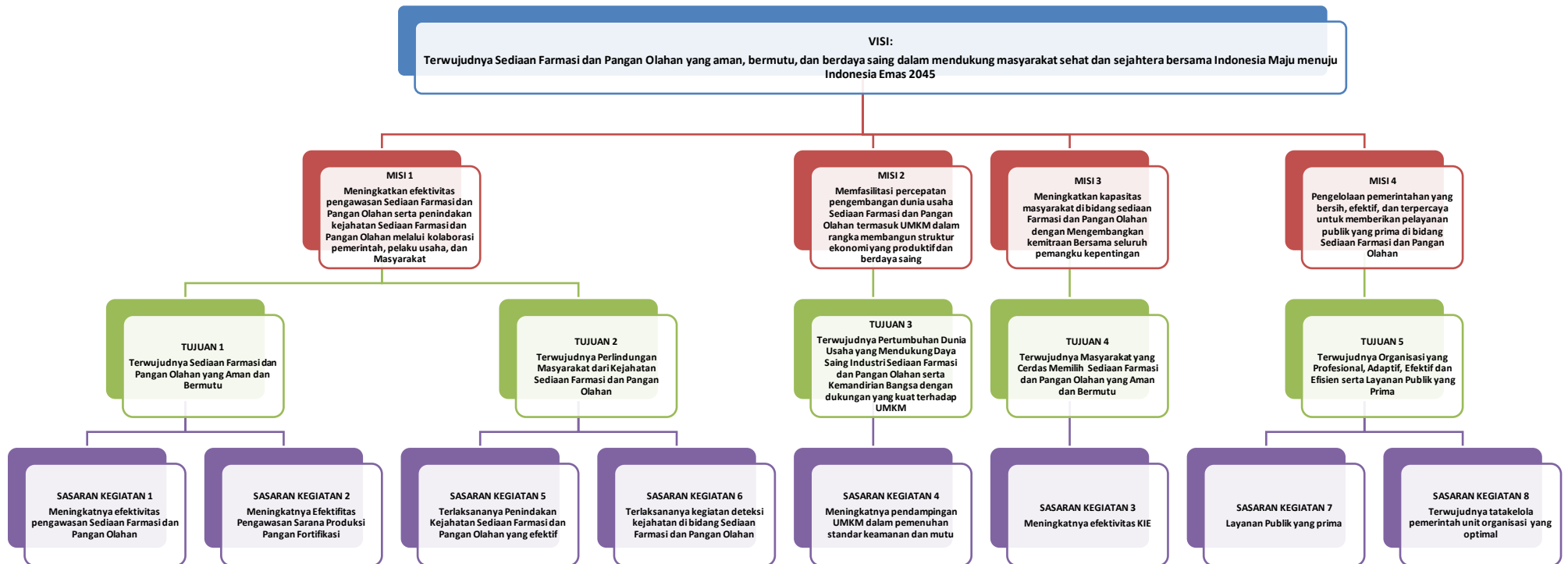
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i> Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif	Layanan Publik UPT yang prima

Visi:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	<i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan Balai POM di Kendari periode 2025-2029 sesuai dengan penjelasan diatas adalah sebagai berikut.



Gambar 37 Kerangka Logis Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai POM di Kendari 2025-2029

Balai POM di Kendari perlu melakukan identifikasi risiko untuk setiap sasaran kegiatan. Hal ini untuk mewujudkan pencapaian setiap sasaran kegiatan yang telah dirancang secara optimal. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM di Kendari untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko yang disusun merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan BPOM di Kendari Adalah sebagai berikut.

Tabel 6 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BPOM di Kendari 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Substansi/ Fungsi Pengampu
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih tingginya peredaran produk Sediaan Farmasi yang tidak sesuai standar	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik di sarana peredaran;	Pemeriksaan, Infokom
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BPOM	a. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha; b. Pendampingan oleh petugas BPOM melalui bimtek dan desk; c. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin kepada sarana peredaran	Pemeriksaan
		Belum terpenuhinya komponen Standar Ruang Lingkup, Peralatan, dan Kompetensi Laboratorium dalam memenuhi kebutuhan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tenggara	Perencanaan penambahan ruang lingkup pengujian, pengusulan pengadaan (pendanaan) pemenuhan peralatan laboratorium dan perencanaan peningkatan kompetensi petugas laboratorium	Pengujian
		Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian; yang berisiko meningkatnya resistensi antimikroba	✓ Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye nasional terkait penggunaan antibiotik yang bijak;	Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Substansi/ Fungsi Pengampu
			✓ Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor	
		Terjadi peningkatan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan di wilayah Sulawesi Tenggara	- Koordinasi dengan BGN dan Satgas MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pengawasan Satuan SPPG; - Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG; pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap SPPG; dan dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB keracunan pangan	Infokom Pemeriksaan Pengujian
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Kepatuhan pelaku usaha Pangan Fortifikasi yang rendah terhadap pemenuhan aspek CPPOB	Pembinaan dan pendampingan teknis melalui Bimbingan Teknis CPPOB bagi pelaku usaha Sarana Produksi Pangan Fortifikasi secara berkala serta Kolaborasi dengan lintas sektor terkait.	Pemeriksaan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Penyebaran KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dan kelompok sasaran secara optimal	- Membuat materi yang menarik dan sesuai sasaran; - Peningkatan Kompetensi Petugas; - Pemberian tools/instrumen evaluasi kesesuaian pelaksanaan KIE sesuai kelompok masyarakat; - Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi;	Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Masih tingginya produk Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam yang diolah yang belum memiliki izin edar	Melakukan pendampingan dan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha terkait CPPOB, CPKB, CPOTB Bertahap	Pemeriksaan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak berjalan optimal	- Pembangunan kesepahaman antara BPOM (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; - Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Negeri; - Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala	Penindakan
		Tingginya peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring (online)	Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan	Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Substansi/ Fungsi Pengampu
			Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti	✓ Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber; ✓ Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penindakan
7	Layanan Publik yang prima	Menurunnya kepuasan Masyarakat karena kurang memadainya sarana dan prasarana (fasilitas)	Pengadaan dan/atau pemeliharaan Sarpras Pelayanan Publik sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Subbag TU, Infokom
		Terjadi Kebocoran pengaduan dan Tindak lanjut pengaduan kurang cepat	Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan BPOM di Kendari	Subbag TU, Pemeriksaan, Infokom
		Pemberitaan terkait kinerja BPOM di berbagai media, baik cetak, online, elektronik dan media sosial bertonasi negatif	Menyebarkan informasi kegiatan strategis BPOM kepada media dan lebih terbuka kepada media	Subbag TU, Infokom
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kemampuan adaptasi pegawai dalam menghadapi dinamika pekerjaan kurang memadai	Peningkatan <i>softskill</i> pegawai melalui pelatihan pengembangan diri baik secara uring maupun daring dalam pembelajaran IDEAS	Subbag TU, Pemeriksaan, Infokom, Pengujian, Penindakan
		Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a) Melaporkan kegiatan pemberian suap melalui aplikasi SANG INTEGRITAS; b) Penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen <i>Anti Fraud</i>; c) Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui inovasi SINGA	Subbag TU, Pemeriksaan, Infokom

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI KENDARI



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan

pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 7 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI KENDARI

Balai POM di Kendari melaksanakan arah kebijakan yang telah dirancang BPOM untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan tugas penjaminan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berkualitas di wilayah Sulawesi Tenggara. Balai POM di Kendari sepenuhnya mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

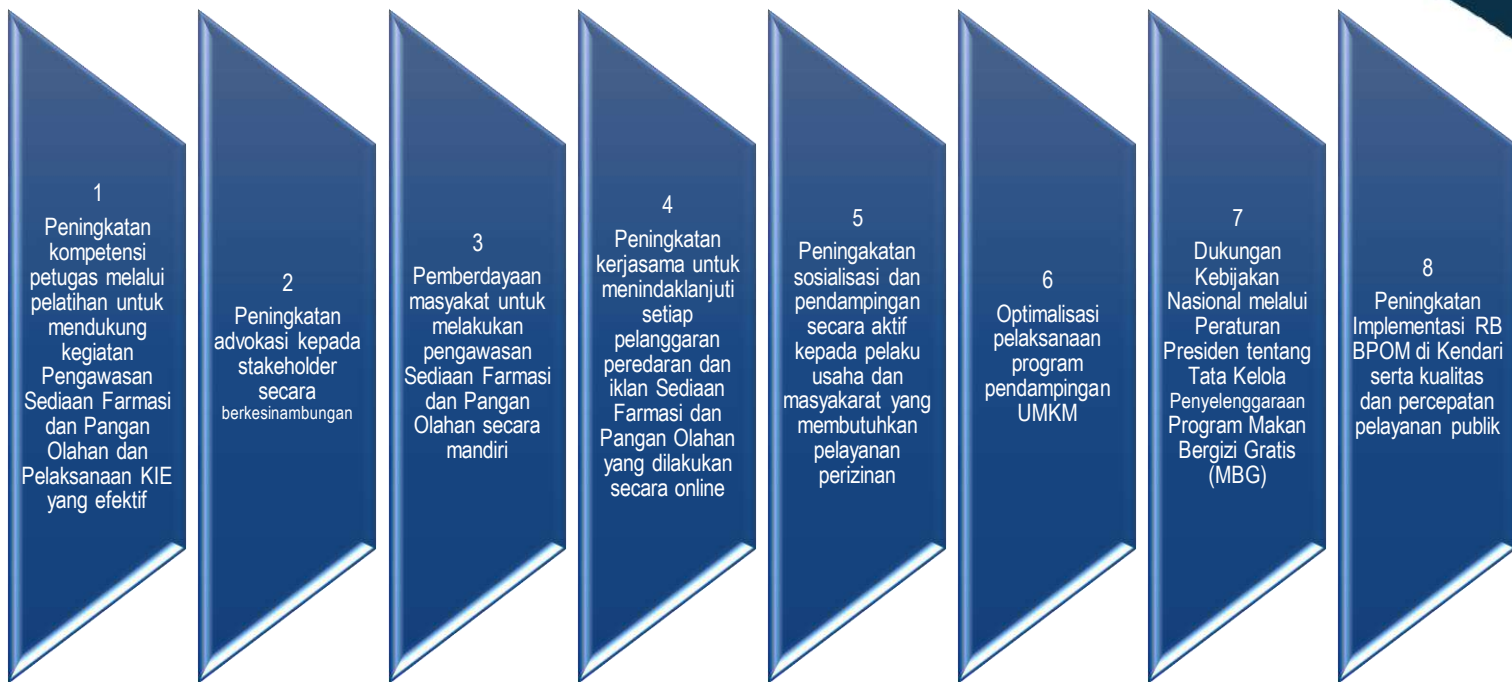
Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan

- penjamah pangan MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
 3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
 4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
 5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
 6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi

dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan Tahun 2025-2029 dengan baik, Balai POM di Kendari telah melakukan analisis strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Rumusan strategi tersebut dilakukan dengan memperhitungkan hasil analisis Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) yang telah diidentifikasi oleh BPOM di Kendari. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan BPOM di Kendari, dalam rangka mencapai sasaran kegiatan periode 2025-2029, beberapa strategi yang telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada; karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal ancaman yang dihadapi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan lebih besar dari pada peluang yang ada. Kombinasi faktor elemen TOWS tersebut menghasilkan beberapa strategi sebagai berikut.



Gambar 38 Strategi BPOM di Kendari 2025-2029

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan untuk mendukung kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan Pelaksanaan KIE yang efektif;

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPOM. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas pengawasan dibidang Obat dan Makanan. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan Pelaksanaan KIE yang efektif yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai; b) menyusun rencana diklat; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala; d) Melaksanakan kegiatan *feedback* penilaian kompetensi secara berkala. Dalam rangka memadukan kekuatan kompetensi BPOM di Kendari untuk mengatasi ancaman peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak aman perlu dilakukan strategi peningkatan kompetensi pelatihan yang seragam dan berkelanjutan untuk mempertahankan keandalan dan integritas BPOM di Kendari dalam melaksanakan tugasnya.

2. Peningkatan advokasi kepada stakeholder secara berkesinambungan;

BPOM memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan premarket Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan olahan, khususnya PIRT di Indonesia melalui DAK Non Fisik. Penguatan koordinasi antara Pemda dan sektor terkait, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan pre-market IRTP dan terintegrasi, serta mampu mendukung pengembangan usaha mikro kecil di bidang pangan olahan dengan tetap menjaga standar keamanan pangan.

Selain itu tantangan kondisi geografis Sulawesi Tenggara yang kompleks menjadikan risiko ancaman peredaran produk yang tidak aman dan bermutu semakin besar. Untuk mengatasi tantangan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dinamis ini BPOM di Kendari harus memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk melaksanakan strategi melalui advokasi dan kolaborasi dengan stakeholder secara berkelanjutan. Melalui kerjasama yang erat dan berkelanjutan dengan berbagai stakeholder, BPOM di Kendari dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru, sehingga memungkinkan BPOM di Kendari untuk menerapkan praktik terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.

3. Pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara mandiri dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia seperti BPOM Mobile, CekBPOM, Halo BPOM dll;

Dalam rangka mengatasi ancaman peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal melalui *e-commerce*, dan penyebaran informasi *hoax* terkait Obat dan Makanan, BPOM di Kendari perlu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Melalui KIE diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi Kesehatan. Pendekatan edukasi dan pemberdayaan diharapkan lebih efektif agar masyarakat terlibat aktif

dalam mendukung inisiatif kesehatan publik dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

4. **Peningkatan kerjasama dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran peredaran dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan secara online;** Penguatan pengawasan *post market* terhadap iklan dan penandaan Sediaan Farmasi sangat penting untuk memastikan informasi yang tepat dan aman bagi konsumen. Dalam rangka mengatasi ancaman peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal melalui e-commerce, BPOM di Kendari harus meningkatkan Kerjasama dengan Kementerian terkait. Hal ini berkenaan dengan semakin maraknya iklan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi ketentuan melalui media online. Wadah kerjasama dapat dilakukan melalui forum koordinasi Pengawasan Iklan dengan Pelaku Usaha di Bidang Farmasi.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pelanggaran iklan di media internet dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan di media offline, karena tren pemasaran online banyak didominasi oleh user-generated content dari perseorangan yang belum memahami regulasi. Oleh karena itu, sinergi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman melalui edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen dalam memilih produk yang sesuai standar.

5. **Peningkatan sosialisasi dan pendampingan secara aktif kepada pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan; dan**

BPOM di Kendari melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. Peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha merupakan bentuk upaya BPOM di Kendari untuk menghadapi peluang pertumbuhan pelaku usaha di Sualwesi Tenggara. Melalui sosialisasi dan pendampingan secara aktif diharapkan dapat menekan risiko ancaman munculnya percaloan/ konsultan dalam penerbitan izin/sertifikasi produk yang tidak bertanggungjawab; yang dapat merusak

reputasi BPOM di Kendari.

6. Optimalisasi pelaksanaan program pendampingan UMKM;

Strategi optimalisasi pelaksanaan program pendampingan UMKM dilakukan melalui beberapa inovasi diantaranya Sipintar dan Pintar Plus. Adanya inovasi ini menunjukkan bahwa BPOM di Kendari secara responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan strategi ini menggambarkan bahwa BPOM di Kendari melaksanakan mandatnya sebagai instansi yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan Masyarakat Sulawesi Tenggara sekaligus turut serta dalam peningkatan perekonomian.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan publik, BPOM di Kendari terus berupaya menghadirkan inovasi dalam rangka pendampingan UMKM. Program tersebut menghasilkan peningkatan penerbitan sertifikasi bagi pelaku usaha industri pangan dan industri rumah tangga, yang pada akhirnya turut serta dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Pintar Plus (Tahun 2025) merupakan inovasi yang memfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha baik secara langsung maupun secara *daring* dalam penerbitan izin edar pangan olahan yaitu izin edar PIRT dan izin edar MD yang dilakukan oleh petugas dari BPOM Kendari. *Pintar Plus* ini adalah *upgrade* dari inovasi *SiPintar* yang telah dibentuk sebelumnya (Tahun 2022) yaitu Program Sertifikasi Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Sehari yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan Sertifikasi PIRT. *SiPintar* dirancang untuk mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi oleh pelaku usaha kecil dalam memperoleh sertifikasi yang diperlukan, sehingga mereka dapat lebih cepat memasarkan produk mereka secara legal dan aman. Sejalan dengan *SiPintar*, inovasi *Pintar Plus* hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM, seperti pemenuhan persyaratan dokumen yang cukup banyak dan waktu pengurusan yang panjang. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik khususnya dalam bidang sertifikasi dan registrasi di BPOM Kendari,

sekaligus mendorong pertumbuhan sektor industri UMKM yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Pelaksanaan Pintar Plus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari pendampingan pelaku usaha dalam pemenuhan sarana dan prasarana produksi, pembuatan dokumen CPPOB, fasilitasi bimtek CPPOB, Coaching e-sertifikasi, Coaching registrasi akun dan registrasi produk hingga mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE).

7. Peningkatan Implementasi RB BPOM di Kendari serta kualitas dan percepatan pelayanan publik;

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, BPOM di Kendari terus memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) melalui berbagai strategi terukur dan berkelanjutan. Strategi ini diarahkan pada 1] Penguatan komitmen dan tata kelola pelaksanaan RB secara internal; 2] peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik; 3] penguatan pengelolaan SDM; dan 4] peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana.

BPOM Kendari menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional pada setiap level manajerial untuk memastikan seluruh pegawai memahami arah dan tujuan reformasi birokrasi. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi berkala, unit kerja didorong untuk menindaklanjuti hasil penilaian RB, memperbaiki area perubahan, serta mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik dilakukan melalui digitalisasi proses bisnis dan penerapan inovasi layanan berbasis teknologi informasi (elektronik). Inovasi pelayanan pengujian sampel pihak ketiga telah dilakukan lebih mudah dan cepat melalui inovasi *SiJempol* dan *ODS*. Hal ini terus dikembangkan untuk mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap layanan BPOM.

Selain itu, BPOM di Kendari berupaya melakukan penguatan pengelolaan SDM sebagai pilar penting dalam peningkatan kinerja organisasi. BPOM Kendari melaksanakan manajemen talenta berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis dan

manajerial, serta mendorong budaya kerja berintegritas dan berorientasi hasil. Selain itu, penerapan sistem penghargaan dan penilaian kinerja menjadi instrumen dalam menjaga motivasi dan profesionalitas pegawai. Dalam peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana difokuskan pada ketersediaan fasilitas yang mendukung pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Pengembangan infrastruktur laboratorium pengujian, peningkatan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, serta pemanfaatan aset secara efisien menjadi bagian dari strategi untuk memastikan bahwa sarana yang tersedia mampu menunjang pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan secara optimal.

Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan implementasi RB BPOM Kendari semakin matang, mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang unggul, responsif, dan berintegritas, serta menjadikan BPOM Kendari sebagai institusi yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

- 8. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG);** Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG merupakan payung koordinatif yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor, baik pusat maupun daerah, dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Melalui Peraturan Presiden ini BPOM diberikan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya terkait pengawalan aspek keamanan pangan khususnya pengawasan bahan baku berupa pangan olahan; pengawasan sarana produksi dan distribusi; dan pengawasan makanan bergizi secara gratis. Dukungan kebijakan nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden ini menjadi peluang strategis bagi BPOM di Kendari. Kebijakan ini membuka ruang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keamanan, mutu, dan gizi pangan yang disalurkan melalui program MBG. BPOM di Kendari dapat berperan aktif dalam aspek pengawasan pangan olahan, pembinaan pelaku usaha pangan lokal, serta edukasi masyarakat mengenai pangan aman dan bergizi. Selain memperkuat implementasi program MBG di Sulawesi Tenggara, peluang ini juga mendukung peningkatan peran BPOM di Kendari

sebagai lembaga yang memastikan MBG berkualitas dan aman dikonsumsi.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Kendari juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Ringasan arah kebijakan dan strategi BPOM di Kendari Tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 8 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Kendari Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN BPOM DI KENDARI	STRATEGI BPOM DI KENDARI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Peningkatan kerjasama dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran peredaran dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan secara online
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	1. Peningkatan sosialisasi dan pendampingan secara aktif kepada pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan 2. Optimalisasi pelaksanaan program pendampingan UMKM
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan	Pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara

ARAH KEBIJAKAN BPOM DI KENDARI	STRATEGI BPOM DI KENDARI
Pangan Olahan	mandiri dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia seperti BPOM Mobile, CekBPOM, Halo BPOM dll
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan advokasi kepada stakeholder secara berkesinambungan
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan untuk mendukung kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan Pelaksanaan KIE yang efektif
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi RB dan kualitas serta percepatan pelayanan publik

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Kendari melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia; dan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM.

3.2.1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Kendari mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, BPOM di Kendari tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu

dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

1. Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pengawasan sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Peningkatan kualitas sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Peningkatan kualitas sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut.

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko;
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database sarana produksi, track record sarana produksi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan;
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi;
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi

2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kepatuhan sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam penerapan regulasi atau standar dalam rantai distribusi berperan penting dalam penjaminan khasiat, mutu dan keamanan produk sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Peningkatan kualitas sarana distribusi dilakukan melalui kegiatan strategis berikut.

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian

Analisis Risiko;

- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database sarana distribusi, track record sarana distribusi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan;
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi;
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi.

3. Sertifikasi Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penjaminan kepatuhan sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan produksi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Sertifikat CPOB, CPKB CPOTB dan CPPOTB). Beberapa Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan sertifikasi sarana produksi adalah sebagai berikut.

- a. Mempersiapkan base line data sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Kendari lengkap dengan status sertifikasi produksinya;
- b. Berkomunikasi intensif dengan sarana produksi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana produksi;
- c. Memfasilitasi sarana produksi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi;
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana produksi termasuk koordinasi dengan BPOM.

4. Sertifikasi Sarana Distribusi Obat

Seperti halnya Sarana Produksi, penjaminan kepatuhan sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan distribusi, dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Distribusi Obat yang saat ini masih diterapkan kepada sarana PBF. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan sertifikasi sarana distribusi antara lain:

- a. Mempersiapkan base line data sarana distribusi yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Kendari lengkap dengan status sertifikasi distribusinya;
- b. Berkomunikasi intensif dengan sarana distribusi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana distribusi;
- c. Memfasilitasi sarana distribusi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi; dan
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana produksi termasuk koordinasi dengan BPOM.

5. Komunikasi, Informasi, Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dikatakan efektif jika pemahaman masyarakat tentang kualitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar bertambah. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsi. Langkah strategis untuk mendukung keberhasilan KIE diantaranya;

- a. KIE tentang Obat dan Makanan Aman yang jangkauannya luas sehingga setiap individu di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dapat terpapar;
- b. Bimbingan teknis dan pendampingan untuk pelaku usaha terkait perizinan lebih sering dilakukan;
- c. Sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha lebih sering dilakukan;
- d. Menggunakan media komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha dan Masyarakat.

6. Pemeriksaan Produk dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan memenuhi syarat atau tidak. Untuk itu, kualitas sampling dan pengujian sangat mempengaruhi sasaran kegiatan ini. Beberapa hal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan sampling dan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan antara lain:

- a. Memperkuat komitmen pelaksanaan sampling dan pengujian berdasarkan Pedoman Sampling agar mencapai target yang telah ditetapkan serta mendorong tindaklanjut hasil pengujian;
- b. Metode sampling dilaksanakan melalui gabungan antara metode purposive targeted dengan pendekatan analisis risiko;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana laboratorium Balai POM di Kendari sesuai persyaratan *Good Laboratory Practices* (GLP) dan Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM;
- d. Meningkatkan standar ruang lingkup akreditasi laboratorium serta Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) terhadap seluruh sampel yang diuji;
- e. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul sampling dan pengujian dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk analisis data dan tindaklanjut dalam kerangka pengawasan;
- f. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian serta tindaklanjut hasil pengujian.

7. Penindakan Tindak Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penindakan tindak pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a. Operasi dan Penyidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini

menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi diikuti oleh kurangnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan mencari celah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa peredaran Obat dan Makanan ilegal dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang beroperasi secara internasional sehingga sulit diberantas menggunakan metode metode konvensional. Untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan di bidang Obat dan Makanan perlu dilakukan solusi holistik pada seluruh rantai demand dan supply Obat dan Makanan dengan pendekatan preventif maupun represif. Selain memerlukan dukungan regulasi yang memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan, BPOM juga memerlukan penguatan secara struktur dan kewenangan diikuti dengan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai.

b. **Penindakan dan Kasus Tindak Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan tugas utama BPOM di Kendari dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap komoditi yang menjadi objek pengawasan BPOM di Kendari. Fenomena beredarnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu di masyarakat tidak bisa dipungkiri. Trend temuan pelanggaran produksi dan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal menunjukkan jumlahnya secara terus menerus meningkat yang diiringi dengan peningkatan modus operandi yang semakin canggih. BPOM di Kendari menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan akan mencapai hasil yang optimal jika ada

kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian “*Integrated Criminal Justice System* (ICJS)” sesuai koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

c. Peningkatan Kerjasama CJS

Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dalam arti luas tidak terlepas dari skema CJS. Peran fungsi Penindakan dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Dalam hal ini fungsi Penindakan menjadi lini terdepan dalam upaya menjalin kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian ICJS.

8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari

BPOM di Kendari tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM. Langkah strategis untuk meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Kendari diantaranya:

- a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur Balai POM di Kendari melalui pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi dan berdampak dalam pengembangan karir selanjutnya;
- b. Mendorong pemenuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsi kelembagaan BPOM di Kendari;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan SDM aparatur BPOM di Kendari meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penegakan disiplin, promosi dan mutasi, penghargaan, penggajian dan tunjangan serta internalisasi budaya kerja;
- d. Mendorong pemenuhan kebutuhan anggaran BPOM di Kendari serta meningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja

- pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Sualwesi Tenggara;
- e. Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 9001: 2015, ISO/IEC/IEC 17025: 2008 dan ISO/IEC 37001:2016, SAKIP, SPIP, manajemen perubahan serta pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan organisasi pembelajar (*Learning Organization*) dalam rangka Reformasi Birokrasi;
 - f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 - g. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penatausahaan Barang Milik Negara, kearsipan, dan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa

3.2.2. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan BPOM di Kendari.

1. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan

Penguatan internal dan eksternal BPOM di Kendari menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media. Dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media terhadap BPOM di Kendari akan tumbuh jika kehadirannya dirasakan memberikan manfaat. Untuk itu, segala upaya BPOM di Kendari dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan harus selalu diinformasikan kepada publik.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu factor yang menentukan keberhasilan BPOM di Kendari dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM pada difokuskan pada 1] Implementasi sistem merit secara konsisten; 2] Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten; 3] Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi.; dan 4] Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital. Selain itu manajemen SDM aparatur dilakukan berdasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif.

Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

3. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Teknologi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM di Kendari untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnisnya. Pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1 TARGET KINERJA
- 4.2 KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dan mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM, BPOM di Kendari menyusun matriks kerangka kinerja periode 2025-2029 yang akan menjadi sasaran akhir kinerja BPOM di Kendari dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan khususnya di wilayah kerja BPOM di Kendari. Matriks ini sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Balai POM di Kendari selama periode 2025-2029. Sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 9 Target Kinerja BPOM di Kendari Periode 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSK1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	86	87,5	89	90,5	%
	IKSK2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30	%
	IKSK3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	86	88	%
	IKSK4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	%
	IKSK5. Persentase PIRT berisiko yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	87	89	92	95	%
	IKSK6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89	90	91	92	93	%
	IKSK7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	88	89	90	91	%
	IKSK8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95	%
	IKSK9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	96,25	97	97,75	98,5	%

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90	%
	IKSK11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,77	90,57	92,17	93,77	95,37	%
	IKSK12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84	%
	IKSK13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	100	100	100	100	100	%
	IKSK14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,5	78,5	82,3	85	87	Nilai
	IKSK15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	9,09	18,18	27,27	36,36	90,91	%
	IKSK16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84	%
	IKSK17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	83	83	83	100	%
SK3. Meningkatnya efektivitas KIE	IKSK18. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86	86,86	87,72	88,58	89,44	Nilai
	IKSK19. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	15	18	20	22	Jumlah
	IKSK20. Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7	Jumlah
	IKSK21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	2	3	Jumlah
SK4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK22. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,54	36,84	56,14	77,19	100	%
SK5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	IKSK23. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80	81	82	83	84	%
SK6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSK24. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94	%
SK7. Layanan Publik yang prima	IKSK25. Indeks Pelayanan Publik	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8	Nilai
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal	IKSK26. Nilai Pembangunan ZI	89	90,05	90,1	90,15	90,2	Nilai
	IKSK27. Nilai AKIP	81	81,5	82	82,5	83	Nilai
	IKSK28. Nilai Kinerja Anggaran	5	5	5	5	5	Nilai
	IKSK29. Indeks Manajemen Risiko	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	Nilai

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Kendari periode 2025-2029 adalah:

Tabel 10 Kerangka Pendanaan BPOM di Kendari 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

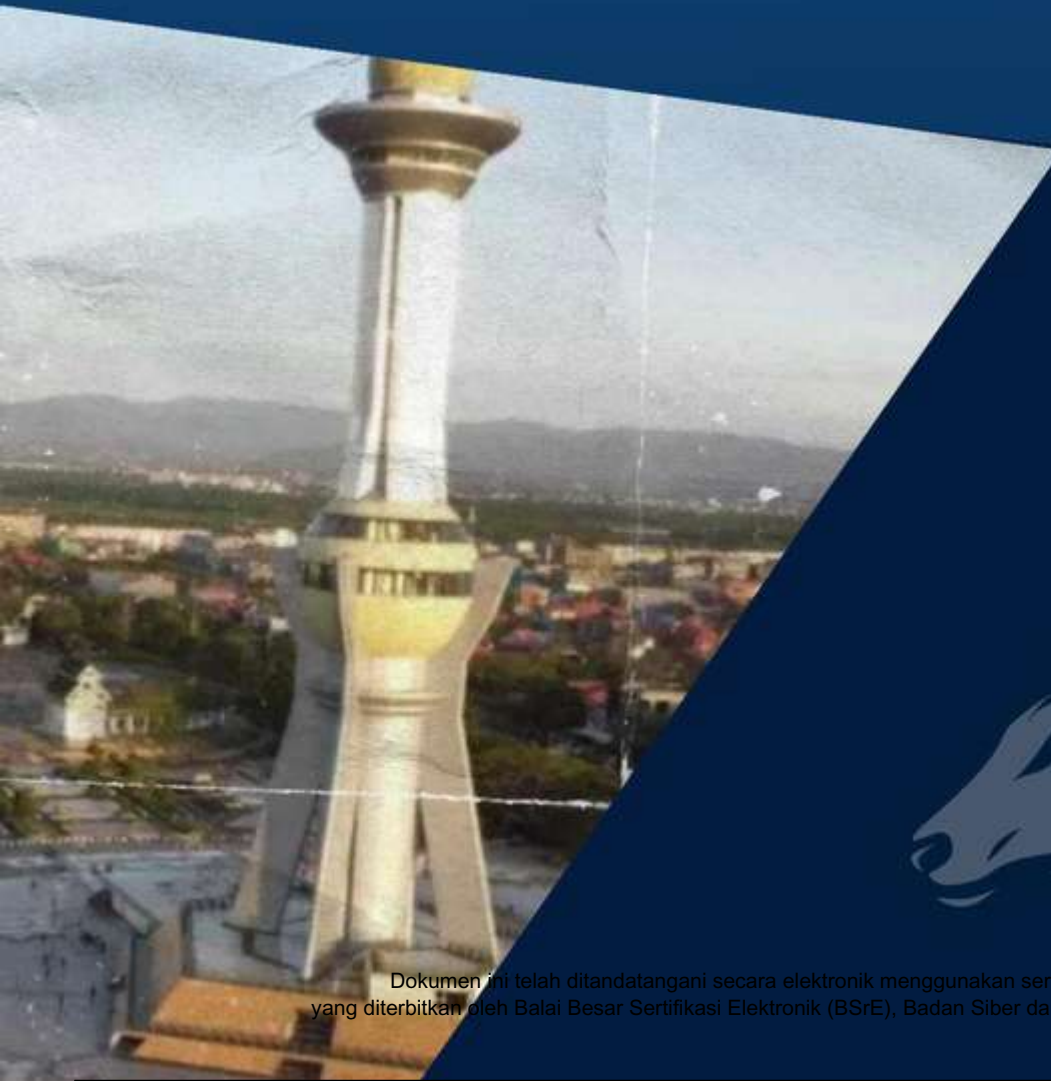
Kegiatan	Alokasi (Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	14.812.789.000	7.496.773.000	28.610.232.600	34.359.628.490	44.075.395.072
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	8.920.107.000	9.439.045.000	21.968.995.000	26.342.496.000	31.403.251.030
Total	23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102

Tabel 11 Kerangka Pendanaan BPOM di Kendari 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Kegiatan	Alokasi (Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	22.532.896.000	15.685.818.000	49.304.227.600	59.402.124.490	74.153.646.102
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.200.000.000	1.250.000.000	1.275.000.000	1.300.000.000	1.325.000.000
Total	23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Renstra BPOM di Kendari 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana STrategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029. serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra BPOM di Kendari 2025-2029 memuat visi. misi. tujuan. sasaran kegiatan. arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman dalam perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

LAMPIRAN



Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(DalamRupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Kendari								23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102	BPOM di Kendari	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								14.812.789.000	7.496.773.000	28.610.232.600	34.359.628.490	44.075.395.072	BPOM di Kendari	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												BPOM di Kendari	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Kendari	84.5	86	87.5	89	90.5						BPOM di Kendari
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BPOM di Kendari	26	27	28	29	30						BPOM di Kendari
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Kendari	80	82	84	86	88						BPOM di Kendari
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	BPOM di Kendari	100	100	100	100	100						BPOM di Kendari
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Kendari	85	87	89	92	95						BPOM di Kendari
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	BPOM di Kendari	89	90	91	92	93						BPOM di Kendari

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(DalamRupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Kendari								23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102	BPOM di Kendari	
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Kendari	87	88	89	90	91						BPOM di Kendari
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Kendari	85	87	89	92	95						BPOM di Kendari
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Kendari	95.5	96.25	97	97.75	98.5						BPOM di Kendari
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Kendari	80	82	84	87	90						BPOM di Kendari
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BPOM di Kendari	88.77	90.57	92.17	93.77	95.37						BPOM di Kendari
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	BPOM di Kendari	80	81	82	83	84						BPOM di Kendari
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BPOM di Kendari	100	100	100	100	100						BPOM di Kendari

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(DalamRupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Kendari								23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102	BPOM di Kendari	
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BPOM di Kendari	74.5	78.5	82.3	85	87						BPOM di Kendari
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	BPOM di Kendari	9.09	18.18	27.27	36.36	90.91						BPOM di Kendari
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Kendari	-	81	82	83	84						BPOM di Kendari
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		BPOM di Kendari	45	47	49	51	53	42.650.000	10.000.000	51.606.000	56.767.000	62.443.000	BPOM di Kendari
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BPOM di Kendari	492	492	492	492	492	473.684.000	505.184.000	894.288.000	1.059.609.000	1.168.645.000	BPOM di Kendari
	RO 3: Sampel Obat. Obat Tradisional. Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		BPOM di Kendari	1011	1020	1072	1128	1188	514.833.000	614.202.000	778.614.000	882.764.000	1.002.586.000	BPOM di Kendari
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BPOM di Kendari	28	37	41	44	49	33.286.000	43.985.000	106.892.000	127.994.000	153.274.000	BPOM di Kendari
	RO 5: Sarana Distribusi Obat. Obat Tradisional. Kosmetik. Suplemen		BPOM di Kendari	545	633	680	733	789	649.098.000	797.252.000	1.168.386.000	1.379.732.000	1.630.884.333	BPOM di Kendari

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(DalamRupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Kendari								23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102	BPOM di Kendari	
	Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		BPOM di Kendari	60	144	144	144	144	-	22.603.000	-	-	-	BPOM di Kendari
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		BPOM di Kendari	1	1	1	1	1	6.000.000.000	-	14.400.000.000	17.280.000.000	20.368.000.000	BPOM di Kendari
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		BPOM di Kendari	1	1	1	1	1	1.022.909.000	1.052.909.000	1.537.793.000	1.745.489.000	3.546.089.700	BPOM di Kendari
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		BPOM di Kendari	1	1	1	1	1	2.200.000.000	2.767.000.000	3.718.000.000	4.833.400.000	6.283.420.000	BPOM di Kendari
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		BPOM di Kendari	0	101	101	101	101						BPOM di Kendari
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		BPOM di Kendari											BPOM di Kendari
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Kendari	67	83	83	83	100						BPOM di Kendari

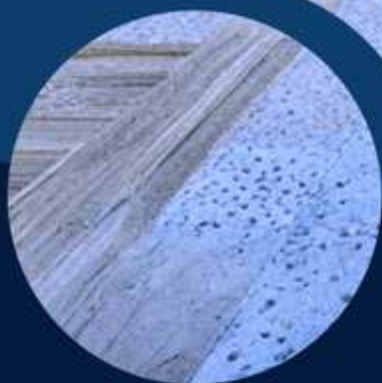
Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(DalamRupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Kendari			BPOM di Kendari						23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102	BPOM di Kendari
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			4	5	5	5	6	4.932.000	5.572.000	6.324.000	7.589.000	9.107.000	BPOM di Kendari
	Meningkatnya efektivitas KIE		BPOM di Kendari											BPOM di Kendari
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BPOM di Kendari	86	86.86	87.72	88.58	89.44						BPOM di Kendari
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	BPOM di Kendari	13	15	18	20	22						BPOM di Kendari
	3	Jumlah desa pangan aman	BPOM di Kendari	4	7	7	7	7						BPOM di Kendari
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	BPOM di Kendari	1	2	2	2	3						BPOM di Kendari
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		BPOM di Kendari	2474	500	600	720	864	864.202.000	690.450.000	364.686.000	401.155.000	441.271.000	BPOM di Kendari
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		BPOM di Kendari	22	7	8	9	10	82.032.000	11.720.000	123.448.000	146.722.000	174.509.000	BPOM di Kendari
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		BPOM di Kendari	13	15	18	20	22	490.400.000	87.437.000	1.272.303.000	1.399.534.000	1.539.487.000	BPOM di Kendari

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(DalamRupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Kendari								23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102	BPOM di Kendari	
	RO 4: Desa Pangan Aman		BPOM di Kendari	4	7	7	7	7	544.477.000	66.571.000	1.485.607.000	1.634.167.000	1.797.581.000	BPOM di Kendari
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		BPOM di Kendari	1	2	2	2	3	108.663.000	56.121.000	324.710.000	725.262.000	797.786.000	BPOM di Kendari
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		BPOM di Kendari											BPOM di Kendari
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	BPOM di Kendari	17.54	36.84	56.14	77.19	100						BPOM di Kendari
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		BPOM di Kendari	10	11	11	12	13	37.617.000	12.047.000	55.770.000	61.347.000	67.481.000	BPOM di Kendari
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		BPOM di Kendari											BPOM di Kendari
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	BPOM di Kendari	80	81	82	83	84						BPOM di Kendari

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(DalamRupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Kendari								23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102	BPOM di Kendari	
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		BPOM di Kendari	4	4	4	4	5	470.300.000	488.520.000	514.151.000	565.563.000	2.676.117.000	BPOM di Kendari
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		BPOM di Kendari											BPOM di Kendari
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	BPOM di Kendari	90	91	92	93	94						BPOM di Kendari
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		BPOM di Kendari	14	14	14	15	15	81.422.000	10.000.000	158.776.000	228.474.000	332.052.000	BPOM di Kendari
	Layanan Publik UPT yang prima		BPOM di Kendari											BPOM di Kendari
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	BPOM di Kendari	4.6	4.65	4.7	4.75	4.8						BPOM di Kendari
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		BPOM di Kendari	137	147	154	159	170	58.228.000	13.450.000	75.758.000	87.924.000	103.602.000	BPOM di Kendari
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		BPOM di Kendari											BPOM di Kendari

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(DalamRupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Kendari								23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102	BPOM di Kendari	
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	BPOM di Kendari	89	90.05	90.10	90.15	90.20						BPOM di Kendari
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	BPOM di Kendari	81	81.5	82	82.5	83						BPOM di Kendari
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	BPOM di Kendari	5	5	5	5	5						BPOM di Kendari
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	BPOM di Kendari	2.9	3.2	3.4	3.6	3.8						BPOM di Kendari
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		BPOM di Kendari	1	1	1	1	1	906.137.000	241.750.000	1.339.340.600	1.467.458.490	1.611.690.239	BPOM di Kendari
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		BPOM di Kendari	1	1	1	1	1	147.919.000	-	118.580.000	130.438.000	143.481.800	BPOM di Kendari
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		BPOM di Kendari	9	9	9	9	9	80.000.000	-	115.200.000	138.240.000	165.888.000	BPOM di Kendari
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									8.920.107.000	9.439.045.000	21.968.995.000	26.342.496.000	31.403.251.030	BPOM di Kendari
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		BPOM di Kendari	1	1	1	1	1	3.380.000	5.000.000	13.520.000	17.576.000	22.848.000	BPOM di Kendari

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(DalamRupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Kendari							23.732.896.000	16.935.818.000	50.579.227.600	60.702.124.490	75.478.646.102	BPOM di Kendari	
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BPOM di Kendari	1	1	1	1	1	8.916.727.000	9.434.045.000	21.955.475.000	26.324.920.000	31.380.403.030	BPOM di Kendari



BALAI POM DI KENDARI

Kompleks Bumi Pradja Anduonohu
Kendari, Sulawesi Tenggara.

Email : bpom.kendari@pom.go.id

Telp. : (0401) 3195513

Facebook,

Instagram,

Tiktok : [@bpom.kendari](https://www.tiktok.com/@bpom.kendari)

X : [@bpomkendari](https://twitter.com/bpomkendari)